

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

DA	H'IA	R ISI	1
A.	PEN	DAHULUAN	3
B.	REV	TU	4
C.	DAS	AR HUKUM	5
υ.		IS REVIU	
	1.	RPJMD	
		Program Kerja Reviu RPJMD	
		Kertas Kerja Reviu RPJMD	
		Catatan Hasil Reviu RPJMD	
		Laporan Hasil Reviu RPJMD	
	2.	RENSTRA	
		Program Kerja Reviu Renstra	
		Kertas Kerja Reviu Renstra	
		Catatan Hasil Reviu Renstra	
		Laporan Hasil Reviu Renstra	
	3.	RKPD	
		Program Kerja Reviu RKPD	
		Kertas Kerja Reviu RKPD	
		Catatan Hasil Reviu RKPD	
		Laporan Hasil Reviu RKPD	
	4.	RENJA	
		Program Kerja Reviu Renja	
		Kertas Kerja Reviu Renja	
		Catatan Hasil Reviu Renja	
	_	Laporan Hasil Reviu Renja	
	5.	KUA-PPAS	
		Program Kerja Reviu KUA-PPAS	
		Kertas Kerja Reviu KUA-PPAS	
		Catatan Hasil Reviu KUA-PPAS	
	_	Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS	
	6.	RKA-SKPD	
		Program Kerja Reviu RKA-SKPD	
		Kertas Kerja Reviu RKA-SKPD	
		Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD 1	
	_	Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD	
	7.	DAK Fisik	
		Program Kerja Reviu DAK Fisik	
		Kertas Kerja Reviu DAK Fisik	
		Catatan Hasil Reviu DAK Fisik	
		Surat Penyampaian Hasil Reviu DAK Fisik	33

8.	LKPD	135
	Penilaian Sistem Pengendalian Intern	137
	Program Kerja Reviu LKPD	140
	Kertas Kerja Reviu LKPD	179
	Catatan Hasil Reviu LKPD	188
	Laporan Hasil Reviu LKPD	190
DAFTA	AR PUSTAKA	194

A. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Audit Internal atau Pengawasan intern menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah seluruh proses kegiatan audit, pemantauan/monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultansi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil merupakan tuntutan era reformasi birokrasi saat ini. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai, serta pengawasan yang efektif dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan intern, termasuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berbagai regulasi tersebut memberikan landasan yuridis bahwa reviu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan Inspektorat sebagai bagian dari fungsi pengawasan intern. Hasil reviu menjadi bahan penting dalam memperkuat akuntabilitas laporan pemerintah daerah, baik dari sisi keuangan, kinerja, maupun perencanaan pembangunan.

B. REVIU

1. Definisi

Di dalam modul Audit Intern Tahun 2014, dijelaskan bahwa Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Dalam kamus hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia: "Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan".

Dengan demikian, reviu berbeda dari audit karena tidak mencakup pengujian mendalam atas bukti, melainkan lebih berfokus pada penelaahan dokumen, wawancara, serta analisis sederhana untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

2. Jenis - Jenis Reviu

Berikut merupakan jenis - jenis reviu yang akan dijelaskan di dalam Buku Panduan Format Reviu ini, yaitu terdiri dari:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan
 - 1) Reviu RPJMD
 - 2) Reviu Renstra
 - 3) Reviu RKPD
 - 4) Reviu Renja
- b. Reviu Dokumen Penganggaran
 - 1) Reviu KUA-PPAS
 - 2) Reviu RKA-SKPD
 - 3) Reviu DAK Fisik
- c. Reviu Laporan Keuangan
 - 1) Reviu LKPD

3. Format Reviu

a. Program Kerja Reviu (PKR)

Program Kerja Reviu merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat meneliti dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan.

b. Kertas Kerja Reviu (KKR)

Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Tim Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu.

c. Catatan Hasil Reviu (CHR)

Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak yang perlu segera dilakukan perbaikan.

d. Laporan Hasil Reviu (LHR)

Pelaporan Hasil Reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang direkomendasikan, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu Adalah untuk mengkomunikasikan hasil Reviu kepada Perangkat Daerah dan Pejabat yang Berwenang untuk mempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu setelah dilakukannya reviu berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. (https://drive.google.com/file/d/1a4DUFnALpg7awPOsCVyRkQwcLSOzKh8/view?usp=sharing)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(https://drive.google.com/file/d/1MASgZQciVW-J5WL67NXnpgMt5lJR3k7j/view?usp=sharing)

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. (https://drive.google.com/file/d/1wCWvu1 iNspdfTWxjRDZVdby1EcKayLx/view?u sp=sharing)
- 4. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER 3 / PK / 2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Outut) Kegiatan Dana AlokasiKhusus fisik.

(https://drive.google.com/file/d/1h6X2eMAm5xNPfVHYK-mlXG2PVicy7Vy/view?usp=sharing)

D. JENIS - JENIS REVIU

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

a. Definisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Kepala Daerah.

b. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

c. Tujuan

Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Sebagai Upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

d. Hal-Hal yang Direviu

- 1) Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD;
- 2) Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD;
- 3) Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD;
- 4) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW;
- 5) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN;
- 6) Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD;

- 7) Pengintegrasian KLHS ke dalam Dokumen RPJMD; dan
- 8) Keselarasan antara Dokumen RPJMD daerah Kabupaten Kota dengan Dokumen RPJMD daerah Provinsi untuk reviu atas RPJMD kabupaten/kota.

e. Tahapan

- 1) Perencanaan Reviu, terdiri atas:
 - i. Pengumpulan informasi umum obyek reviu
 - ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko
 - iii. Penyusunan Program Kerja Reviu
 - iv. Penetapan tim reviu
- 2) Pelaksanaan reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen RPJMD. Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.
- 3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu.

f. Format

Program Kerja Reviu RPJMD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAP AKHIR RPJMD. Tujuan: Untuk menguji bahwa telah didukung dengan dokume	Rancar	ngan Akhir	r RPJMD	vang d	
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
	 RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW, Laporan KLHS; 					
	Berita Acara Musrenbang RPJMD;					
	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun Sebelumnya;					
	Laporan hasil verifikasi rancangan Renstra- Perangkat Daerah; dan					
	5. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RPJMD.					
В	KETERHUBUNGAN DAN KES DENGAN DOKUMEN RPJPD.	SESUAIA	N ANTAR	A DOKUM	MEN	RPJMD
	Bukalah dokumen RPJMD Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.							
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	KCt.							
	membuka Dokumen RPJPD Bab V tentang Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah.												
	Perhatikan dengan seksama sasaran Visi Misi dalam Bab V RPJMD dengan sasaran pokok dalam Bab V RPJPD, uji apakah sudah selaras.												
	3. Buat kesimpulan												
	TUJUAN, SASARAN, ARAH KE RPJMD Tujuan: Untuk menguji rumusa mendukung pencapaian sasarar	n progra	ım dalam ı										
	Buka Dokumen RPJMD Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah.												
	Uji apakah program pembangunan daerah dalam Bab V mendukung pencapaian sasaran RPJMD dalam Bab VI												
	3. Buat kesimpulan.												
D	KONSISTENSI ANTAR BAB DAL	AM DOK	UMEN RP	JMD		KONSISTENSI ANTAR BAB DALAM DOKUMEN RPJMD							

No Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktı	ı (Jam)	KKR	Ket.
No Langkan-Langkan Kerja Keviti	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	KCt.
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah, Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah, dan Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dokumen RPJMD					
Penilaian Konsistensi Antar Bab II, 3ab VI, Bab VII dan Bab VIII Dalam Dokumen RPJMD					
2. Buka Bab VI dan Bab VII perhatikan dengan seksama setiap indikator program, kemudian periksalah: • Apakah nama program sudah tertulis dengan benar? • Lalu apakah indikator kinerja setiap program telah tertulis atau belum? • Jika sudah, maka nilailah apakah indikator tersebut bersifat aktivitas (activity), perkiraan (proxy) atau hasil (outcome)? Sedapat mungkin indikator yang digunakan bersifat outcome.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktı	ı (Jam)	KKR	Vet
40	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	Jika belum, maka catat dalam kolom pemeriksaan, dan beri rekomendasi agar tim penyusun RPJMD menggunakan indikator yang bersifat outcome. Selanjutnya tuliskanlah pada kolom pemeriksaan, nomor halaman dimana indikator dan nilai indikator kinerja yang harus diperbaiki pada Bab VI dan Bab VII. Hal ini untuk memudahkan dalam					
	melakukan koreksi. 3. Buka Bab II: • Temukan dimana data pendukung indikator yang sebelumnya dibahas pada Bab VI dan Bab VII. Penempatan bahasan indikator tersebut harus tepat, pada 'aspek' dan 'fokus' pembangunan. • Jika belum terdapat, maka tuliskan nomor halaman untuk menyajikan data yang harus ditambahkan					

D.T.		Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	17.54
No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	Kemudian, setelah menulis redaksi indikator tersebut, lalu buka kembali Bab VI untuk memeriksa kesesuaiannya dengan Bab VII					
	4. Buka Bab VIII Bab VIII merupakan penjabaran dari penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, maka periksalah kembali konsistensi indikator kinerja yang terdapat pada Bab VIII ini dengan yang telah tertulis pada Bab VII.					

4400		Dilaks	Waktı	ı (Jam)	KKR	g poste
No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	Jika belum sesuai, silahkan dilengkapi dan disesuaikan. Tuliskan nomor halaman yang memuat indikator tersebut seharusnya berada pada Bab VIII.					
	5. Buat kesimpulan.					
Е	PENGINTEGRASIAN HASIL M DOKUMEN RPJMD	USRENE	BANG RR	MD DAE	RAH I	DALAM
	Buka dokumen RPJMD dan berita acara Musrenbang RPJMD.					
	Perhatikan dengan seksama Bab V dokumen RPJMD, apakah misi, tujuan, sasaran dan indikator telah sesuai dengan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD					
	3. Perhatikan dengan seksama Bab VI dokumen RPJMD, apakah strategi dan arah kebijakan RPJMD telah sesuai dengan Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD					
	Perhatikan dengan seksama Bab VII dokumen RPJMD, apakah Kerangka Pendanaan Pembangunan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket
NO	Langkan-Langkan Kerja Kevid	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	KCL
	Dan Program Perangkat Daerah RPJMD telah sesuai dengan Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD					
	Buat kesimpulan.					
F	KESELARASAN ANTARA DOKUI	MEN RP.	JMD DENC	AN DOKU	MEN R	TRW
	1. Perhatikan dengan seksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Bab IV Permasalahan Dan Isu Srategis Daerah, kemudian nilai apakah telah sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah dan Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada dokumen RTRW?					
	Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan.					
	3. Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, serta cantumkan no halaman dimana pembahasan harus ditambahkan dalam Bab II dan Bab IV RPJMD.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	KCL.
	4. Buat kesimpulan.					
3	KESELARASAN ANTARA DOKUI	MEN RP.	JMD DENC	AN DOKU	MEN R	PJMN
	Sasaran Pembangunan Nasional					
	Pelajari dan cermati bagian Bab V dokumen RPJMN Buku 1 dan Bab V dokumen RPJMD					
	Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub Bab V.4 tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN Buku 1.					
	3. Periksa Apakah di dalam tujuan dan sasaran RPJMD pada Bab V telah terakomodasi sasaran sasaran pokok pembangunan RPJMN?					
	4. Buat kesimpulan.					
	Agenda Pembangunan Nasional					
	Pelajari dan cermati agenda pembangunan nasional dalam Bab VI dokumen RPJMN Buku I					
	2. Lihatlah dengan seksama strategi arah kebijakan pada Bab VI dokumen RPJMD, kemudian lakukan identifikasi strategi dan arah kebijakan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktı	ı (Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	KCL.
	mana saja yang memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional					
	3. Buat kesimpulan.					
	Prioritas Pembangunan Nasional					
	Pelajari dan cermati dokumen RPJMN Buku III bagian Prioritas Program Pembangunan serta Bab VI dan Bab VII RPJMD.					
	2. Periksa apakah program dalam Bab VI dan Bab VII RPJMD telah mendukung Prioritas Program Pembangunan untuk masing-masing wilayah?					
	3. Buat kesimpulan.					

Kertas Kerja Reviu RPJMD

	No. Indeks KKR	(2)
Inspektorat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Disusun oleh/Tanggal	(3)
inspektorat daeran Provinsi/Kabupaten/Kota	Direviu oleh/Tanggal	(4)
	Disetujui oleh/Tanggal	(5)
REVIU		
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD/RENSTI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (6)	RA PERANGKAT DAE	ERAH
Fokus Reviu		
(7)		
Langkah-Langkah Kerja Reviu		
(8)		
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar	r KKR No. Indel	ts KKR
* * *	r KKR No. Indel	cs KKR
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar Pendukung)	No. Inde	cs KKR

Petunjuk Pengisian Formulir VII:

- (1) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi Kabupaten/Kota berkenaan
- (2) Diisi dengan Nomor Indeks KKR
- (3) Diisi dengan Nama Penyusun KKR dan tanggal Penyusunan
- (4) Diisi dengan Nama Pereviu KKR dan tanggal Pelaksanaan Reviu
- (5) Diisi dengan Nama Supervisor/ Pengendali Teknis Tim Reviu (yang berwenang menyetujui)
- (6) Diisi dengan Judul & Periode RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang direviu
- (7) Diisi dengan Fokus Reviu yang menjadi ruang lingkup KKR
- (8) Diisi dengan Langkah Kerja Reviu yang dipilih
 - (9) Diisi dengan Judul KKR Pendukung untuk tiap langkah kerja reviu
 - (10) Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung
 - (11) Diisi dengan Kesimpulan Pelaksanaan Reviu
 - (12) Diisi dengan Komentar Pereviu KKR atau pemberi persetujuan

Catatan Hasil Reviu RPJMD

nspektorat [Prov/	Kab/Kota] [1]	
CATATAN HAS	IL REVIU	
RANCANGAN.	KHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN [2]	
[PROV/KAB/R	OTA] [3]	
POLICE CONTROL OF STA	and the state of t	

	£7	Disusun oleh/Tanggal	(5)
Inspekto [Prov/Ka	rat b/Kota] (4)	Direviu oleh/Tanggal	(6)
		Disetujui oleh/Tanggal	(7)
	REV	IU	
RANCAI	NGAN AKHIR DOKUMEN RPJM	ID PROVINSI/KABUPATEN/	KOTA (8
Uraian C	Catatan Hasil Reviu	No. Inde	eks KKR
Prosedu	Penyusunan Dokumen RPJM	D:	
	(9)	(10))
Penyajia	n Dokumen RPJMD:		
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Da	erah	
	(11)	(12	2)
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuar Serta Kerangka Pendanaan	ngan Daerah	
	(13)	(14)
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasara	n	
	(15)	(16	i)

	(Nama) NIP (27)	(Nam NIP	
	Sekretaris Daerah	(26 Inspek)
	RE	(25)	
	(23)	VOMENDAGI	(24)
BAB IX	Penetapan Indikator Kind	erja Daerah	(0.4)
a lay atempany	(21)	Video of Weston and American	(22)
BAB VIII	Indikasi Rencana Progra disertai Kebutuhan Pend		ell a Per
	(19)		(20)
BAB VII	Kebijakan Umum dan Pr Daerah	ogram Pembangunan	
	(17)		(18)
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijal	kan	

Petunjuk Pengisian Formulir VII.1a:

- (1) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan
- (2) Diisi dengan tahun periodesasi RPJMD (contoh Tahun 2016-2021)
- (3) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan
- (4) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan
- (5) Diisi dengan Nama Penyusun Catatan Hasil Reviu dan tanggal Penyusunan
- (6) Diisi dengan Nama Pereviu Catatan Hasil Reviu dan tanggal Pelaksanaan Reviu
- (7) Diisi dengan Nama Supervisor/Pengendali Teknis Tim Reviu (pejabat yang berwenang menyetujui)
- (8) Diisi dengan Nama Dokumen dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta tahun periodesasi RPJMD yang direviu. Contoh: RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD KOTA AMBARAWA TAHUN 2016-20121
- (9) Diisi dengan catatan hasil reviu atas prosedur penyusunan dokumen RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (10) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu fokus reviu prosedur penyusunan dokumen RPJMD yang diberikan catatan hasil reviu .
- (11) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB II dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.

- (12) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB II yang diberikan catatan hasil reviu.
- (13) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB III dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (14) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB III yang diberikan catatan hasil reviu.
- (15) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB V dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (16) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB V yang diberikan catatan hasil reviu.
- (17) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VI dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (18) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB VI yang diberikan catatan hasil reviu.
- (19) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VII dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (20) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB VII yang diberikan catatan hasil reviu.
- (21) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VIII dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (22) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB VIII yang diberikan catatan hasil reviu.
- (23) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB IX dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (24) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB IX yang diberikan catatan hasil reviu.
- (25) Diisi dengan rekomendasi berupa saran koreksi/perbaikan berdasarkan usulan pereviu.
- (26) Diisi dengan Nama ibukota Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dan tanggal penyusunan Catatan Hasil Reviu.
- (27) Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat Sekretaris Daerah yang menandatangani Catatan Hasil Reviu selaku penanggung jawab Tim penyusun RPJMD.
- (28) Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai Inspektur yang menandatangani Catatan Hasil Reviu.

Laporan Hasil Reviu RPJMD

spektorat dae	rah Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	
LAPORAN I	HASIL REVIU	
	AN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN (2) KABUPATEN/KOTA (3)	
NOMOR LE	IR: (4)	
TANGGAL:	(5)	

LAPORAN HASIL REVIU DOKUMEN RPJMD TAHUN (2) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (3)

I. Ringkasan Eksekutif

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

 Inspektorat provinsi/kabupaten/kota (3) sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen RPJMD Tahun (2) provinsi/kabupaten/kota (3) berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun (2) mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen RPJMD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun (2) dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2.	Berdasarkan	hasil	reviu	yang	kami	lakukan,	kami	menyimpulkan
	hal-hal sebag	ai ber	ikut:					
	1							

7.7	
er.	
580	
100	

5. dst

II. Dasar Hukum

[Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-Perangkat Daerah, termasuk Surat Tugas Reviu]

- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-Perangkat Daerah.
- Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal surat tugas].
- 8. dst

Ruang Lingkup Reviu

III. Tujuan Reviu[Berisi mengenai tujuan reviu]IV. Ruang Lingkup Reviu[Berisi mengenai ruang lingkup reviu]V. Metodologi Reviu

[Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu dokumen RPJMD]

VI. Gambaran Umum

[Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi kondisi perencanaan secara umum]

VII. Uraian Hasil Reviu

[Berisi catatan hasil reviu]

VIII Apresiasi

[Berisi mengenai Apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif dan kooperatif mendukung tugas reviu]

....., [Tanggal/Bulan/Tahun] (4) [Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota] (3)

> (Nama) NIP. (5)

Petunjuk Pengisian Formulir VII.1b:

- (1) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan
- (2) Diisi dengan tahun periodesasi RPJMD (contoh Tahun 2016-2021)
- (3) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan
- (4) Diisi dengan Nama ibukota daerah provinsi/kabupaten/kota berkenaan dan tanggal penandatanganan Laporan Hasil Reviu
- (5) Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai inspektur daerah yang menandatangani Laporan Hasil Reviu.

2. Rencana Strategis (Renstra)

a. Definisi

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

b. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

c. Tujuan

Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

d. Hal-Hal yang Direviu

- Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah; dan
- Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD

e. Tahapan

- 1) Perencanaan Reviu, terdiri atas:
 - i. Pengumpulan informasi umum obyek reviu
 - ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko
 - iii. Penyusunan Program Kerja Reviu
 - iv. Penetapan tim reviu
- 2) Pelaksanaan reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen Renstra. Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.
- 3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu

f. Format

Program Kerja Reviu Renstra

No	Langkah Langkah Keria Berin	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
A.	PENGUJIAN ATAS KELENGKAI RANCANGAN AKHIR RENSTRA- F Tujuan: Untuk menguji bahwa Daerah yang disusun telah did yang memadai.	ERANGE Rancai	KAT DAERA ngan Akhi	AH. ir Renstra	-Peran	igkat
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:					
	Perda tentang RPJMD;					
	Dokumen rancangan akhir Renstra-Perangkat Daerah;					
	Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra- Perangkat Daerah periode sebelumnya;					
	Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra-Perangkat Daerah.					
В,	KONSISTENSI & KETERHUBUI PERANGKAT DAERAH DENGAN I Tujuan: Untuk menguji rumus kegiatan dalam Renstra-Perangk dengan RPJMD	OOKUME an indik	N RPJMD kator dan	pagu pro	gram	serta
	Pelajari dan cermati bagian Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Renstra-Perangkat Daerah dan Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah RPJMD.					
	Perhatikan Bab VI Renstra- Perangkat Daerah, amati dengan seksama masing- masing nama program, indikator dan target kinerja program, pagu program, dan perangkat daerah					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	(Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	NC.
	penanggungjawab program apakah telah sesuai dengan Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah yang tercantum pada Bab VII RPJMD.					
	3. Buat kesimpulan					
Ren	ilaian Keterhubungan Kegiatan astra-Perangkat Daerah Terhadap acapaian Program Pembangunan erah RPJMD					
	Cermati Bab VI Renstra- Perangkat Daerah dan Bab VI RPJMD.					
	Periksa apakah nama kegiatan serta indikator dan target kinerja kegiatan pada Bab VI Renstra-Perangkat Daerah telah mendukung pencapaian target kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bab VI RPJMD					
	3. Buat kesimpulan					
C.	KETERHUBUNGAN DAN KESE DENGAN TUJUAN, DAN SASA DOKUMEN RENSTRA- PERANGKA Tujuan: Untuk menguji rumus Renstra- Perangkat Daerah men Perangkat Daerah	ARAN F AT DAER san pro	PERANGKA RAH gram dala	T DAERA	.H D/ ngan	ALAM akhir
	4. Pelajari dan cermati bagian Bab II Gambaran Pelayanan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	(Jam)	KKR	Ket.
10	Langhan-Langhan herja heviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Met
	Perangkat Daerah, Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan dan Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Renstra- Perangkat Daerah.					
	5. Lihatlah tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Bab VI. • Apakah nama program dan kegiatan Perangkat Daerah sudah tertulis dengan benar • Lalu apakah indikator kinerja setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah telah tertulis atau belum • Pastikan indikator kinerja setiap program dan kegiatan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C) • Jika sudah, tuliskanlah. Jika belum, maka beri keterangan kolom pemeriksaan dan beri rekomendasi untuk					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket
	melengkapinya, disertai dengan menuliskan nomor halaman. • Selanjutnya, lihatlah apakah seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah telah dilengkapi dengan target capaian kinerja • Jika belum, tulislah dalam kolom pemeriksaan dan berikan rekomendasi agar target kinerja tersebut diisi.					
	6. Cermati Bab II, temukan pembahasan data pendukung setiap indikator yang sebelumnya diamati pada Bab VI. Jika tidak ada, tuliskan nomor halaman dimana data tersebut harus dilengkapi, kemudian lengkapilah data tersebut.					
	dilengkapi, kemudian					

Kertas Kerja Reviu Renstra

	No. In	deks KKR	(2)
In analytomat deemah Deswinsi /Volksynsten /Volks	Disus oleh/	un Γanggal	(3)
Inspektorat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Direvi	u Γanggal	(4)
	Disett oleh/	ıjui Γanggal	(5)
REVIU			
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD/RENST PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (6)	RA PERA	NGKAT DAE	RAH
Fokus Reviu			
(7)			
Langkah-Langkah Kerja Reviu			
(8)			
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Dafta Pendukung)	r KKR	No. Indek	s KKR
(9)		(10)	
Simpulan			
(11)			
Vamentar			

Petunjuk Pengisian Formulir VII: Komentar

- (1) Diisi dengan Nama Daerah Provin Rabupaten/Kota berkenaan
- (2) Diisi dengan Nomor Indeks KKR
- (3) Diisi dengan Nama Penyusun KKR dan tanggal Penyusunan
- (4) Diisi dengan Nama Pereviu KKR dan tanggal Pelaksanaan Reviu
- (5) Diisi dengan Nama Supervisor/ Pengendali Teknis Tim Reviu (yang berwenang menyetujui)
- (6) Diisi dengan Judul & Periode RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang direviu
- (7) Diisi dengan Fokus Reviu yang menjadi ruang lingkup KKR
- (8) Diisi dengan Langkah Kerja Reviu yang dipilih
- (9) Diisi dengan Judul KKR Pendukung untuk tiap langkah kerja reviu
- (10) Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung
- (11) Diisi dengan Kesimpulan Pelaksanaan Reviu
- (12) Diisi dengan Komentar Pereviu KKR atau pemberi persetujuan

Catatan Hasil Reviu Renstra

nspektorat	[Prov/Kab/Kota] (1)
CATATA	N HASIL REVIU
	IGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-PERANGKAT I TAHUN (2)
	PERANGKAT DAERAH] (3) KAB/KOTA] (4)

Contoh Formulir Catatan Hasil Reviu Dokumen Renstra Perangkat Daerah

		Disusun (5 oleh/Tanggal Direviu (6 oleh/Tanggal Disetujui (7 oleh/Tanggal	
Inspektorat [Prov/Kab/Kota] (1)	T055330		
	REVIU		17
RANCANGAN AKHIR DOKUMEN R (3) TAHUN (2)	ENSTRA-[NAMA PERA	NGKAT DAI	ERAH]
Uraian Catatan Hasil Reviu		No. Indeks KKR	
Prosedur Penyusunan Dokumen R Daerah:	enstra-Perangkat		
(8)		(9)	
Penyajian Dokumen RPJMD:			
BAB II Gambaran Layanan Perang	gkat Daerah		
(10)		(11)	
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sa Kebijakan	saran, Strategi dan		
(12)		(13)	
BAB V Rencana program dan kegia kelompok sasaran dan pend			
(14)		(15)	
BAB VI Indikator kinerja Pera mengacu pada tujuan dan s			
(16)		(17)	
RE	KOMENDASI		
	(18)		
Kepala [NAMA SKPD] (3)		, tgl/bln/tahun (19) Dalnis/Supervisor/Irban	
(Nama) NIP (20)	3,120,120,1	(Nama) NIP (21)	

Petunjuk Pengisian Formulir VII.2a:

- (1) Diisi dengan Nama Daerah provinsi/kabupaten/kota berkenaan
- Diisi dengan tahun periodesasi Renstra-Perangkat Daerah (contoh Tahun 2016-2021)
- (3) Diisi dengan Nama Perangkat Daerah yang direviu
- (4) Diisi dengan Nama Daerah provinsi/kabupaten/kota berkenaan
- (5) Diisi dengan Nama Penyusun Catatan Hasil Reviu dan tanggal Penyusunan
- (6) Diisi dengan Nama Pereviu Catatan Hasil Reviu dan tanggal Pelaksanaan Reviu
- (7) Diisi dengan Nama Supervisor/Pengendali Teknis Tim Reviu (pejabat yang berwenang menyetujui)
- (8) Diisi dengan catatan hasil reviu atas prosedur penyusunan dokumen Renstra-Perangkat Daerah berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (9) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu fokus reviu prosedur penyusunan dokumen Renstra- Perangkat Daerah yang diberikan catatan hasil reviu .
- (10) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB II dokumen rancangan akhir Renstra-Perangkat Daerah berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (11) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB II yang diberikan Catatan Hasil Reviu.
- (12) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB IV dokumen rancangan akhir Renstra- Perangkat Daerah berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (13) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB IV yang diberikan Catatan Hasil Reviu.
- (14) Diisi dengan Catatan Hasil Reviu atas penyajian BAB V dokumen rancangan akhir Renstra- Perangkat Daerah berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (15) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB V yang diberikan Catatan Hasil Reviu.
- (16) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VI dokumen rancangan akhir RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- (17) Diisi dengan nomor indeks Kertas Kerja Reviu atas penyajian BAB VI yang diberikan Catatan Hasil Reviu.
- (18) Diisi dengan rekomendasi berupa saran koreksi/perbaikan berdasarkan usulan pereviu.
- (19) Diisi dengan Nama ibukota daerah provinsi/kabupaten/kota berkenaan dan tanggal penyusunan Catatan Hasil Reviu.
- (20) Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai kepala perangkat daerah yang menandatangani Catatan Hasil Reviu selaku penanggung jawab Tim penyusun Renstra-Perangkat Daerah.
- (21) Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai Supervisor/Pengendali Teknis yang menandatangani Catatan Hasil Reviu.

Laporan Hasil Reviu Renstra

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-PERANGKAT DAERAH TAHUN (2) [NAMA PERANGKAT DAERAH] (3)

[PROV/KAB/KOTA] (4)

I. Ringkasan Eksekutif

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

 Inspektorat provinsi/kabupaten/kota (3) sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra Perangkat Daerah [NAMA Perangkat Daerah] (3) Tahun (2) provinsi/kabupaten/kota (3) berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra-Perangkat Daerah Tahun (2) mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap disahkan oleh Kepala Daerah.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra- Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra- Perangkat Daerah yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra- Perangkat Daerah Tahun (2) dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan halhal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

II Dasar Hukum

[Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra- Perangkat Daerah, termasuk Surat Tugas Reviu]

- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-Perangkat Daerah.
- Surat Tugas InspekturNomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal surat tugas].
- 8. dst
- III. Tujuan Reviu

[Berisi mengenai tujuan reviu]

IV. Ruang Lingkup Reviu

[Berisi mengenai ruang lingkup reviu]

V. Metodologi Reviu

[Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu dokumen Renstra Perangkat Daerah]

VI. Gambaran Umum

[Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi kondisi perencanaan secara umum]

VII. Uraian Hasil Reviu

[Berisi catatan hasil reviu]

VIII Apresiasi

[Berisi mengenai Apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif dan kooperatif mendukung tugas reviu]

....., [Tanggal/Bulan/Tahun] (4)
Inspektur [Provinsi/Kabupaten/Kota] (1)
(Nama)

NIP. (5)

Pengisian Formulir VII.2b:

- (1) Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota berkenaan
- (2) Diisi dengan tahun periodesasi Renstra-Perangkat Daerah (contoh Tahun 2016-2021)
- (3) Diisi dengan nama perangkat daerah berkenaan
- (4) Diisi dengan Nama ibukota daerah provinsi/kabupaten/kota berkenaan dan tanggal penandatanganan Laporan Hasil Reviu
- (5) Diisi dengan nama dan Nomor Induk Pegawai Inspektur daerah yang menandatangani Laporan Hasil Reviu.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

a. Definisi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

b. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

c. Tujuan

Untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

d. Hal-Hal yang Direviu

- Kesesuaian informasi dalam RKPD dengan informasi dalam RPJMD; dan
- 2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan Pembangunan.

e. Tahapan

- 1) Perencanaan Reviu, terdiri dari:
 - i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu;
 - ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
 - iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan
 - iv. Penetapan tim reviu
- 2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.
- 3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu

f. Format

Program Kerja Reviu RKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	(Jam)	KKR	Ket.
140	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPA AKHIR RKPD. Tujuan: untuk menguji bahwa ra didukung dengan dokumen peren	ıncanga	n akhir Ri	KPD yang o		
1	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi: a. RPJMD; b. Renstra Perangkat Daerah; c. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; d. Berita acara Musrenbang RKPD; e. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD; dan f. Dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu.					
2	Buat Kesimpulan					
В	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RPJMD. Tujuan: untuk menguji rum berpedoman pada RPJMD.					
1	Analisis rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Bab IV rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan					

No	Langkah Langkah Karis Baris	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Vet	
140	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana Realisasi		No.	Ket.	
	sasaran pada Bab V dan						
	strategi, arah kebijakan dan						
	program pembangunan daerah						
	pada Bab VI yang ditetapkan						
	dalam RPJMD.						
2	Analisis kesesuaian nama						
	program, pagu dana, indikator						
	dan target kinerja serta						
	Perangkat Daerah penanggung						
	jawab pada Bab V rencana						
	kerja dan pendanaan daerah						
	dalam rancangan akhir RKPD,						
	dengan Bab VII kerangka						
	pendanaan pembangunan dan						
	program Perangkat Daerah						
	yang ditetapkan dalam						
	RPJMD.						
3	Analisis kesesuaian nama						
	program dan kegiatan, pagu						
	dana, indikator dan target						
	kinerja serta perangkat daerah						
	penanggungjawab pada Bab V						
	rencana kerja dan pendanaan						
	daerah dalam rancangan akhir						
	RKPD, dengan Bab VI rencana						
	program dan kegiatan serta						
	pendanaan yang ditetapkan						
	dalam Renstra Perangkat						
	Daerah.						
4	Analisis kesesuaian						
	perhitungan proyeksi						
	kapasitas riil keuangan Daerah						
	pada Bab III kerangka ekonomi						
	dan keuangan daerah dalam						
	rancangan akhir RKPD dengan						

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	- Alle Alle Well III	(Jam)	KKR	Ket.
110		Oleh	Rencana	Realisasi	No.	1100
	Bab III gambaran keuangan					
	daerah dalam RPJMD.					
5	Analisis kesesuaian					
	pencantuman indikator dan					
	target kinerja pada Bab VI					
	kinerja penyelenggaraan					
	pemerintahan daerah dalam					
	rancangan akhir RKPD dengan					
	Bab VIII kinerja					
	penyelenggaraan					
	pemerintahan daerah dalam					
	RPJMD.					
6	Buat kesimpulan.					
С	PENGUJIAN ATAS PENYUSUNA	N SUBS	STANSI AN	TAR BAB	RANC	ANGAN
	AKHIR RKPD					
	Tujuan: untuk menguji rumus	an ranc	angan akh	ir RKPD t	elah d	isusun
	sesuai dengan tahapan, tata ca	ra dan s	sistematika	penyusur	nan do	kumen
	RKPD					
	Lakukan permintaan keterar	ngan te	rkait pro	ses peny	usunai	n dan
	sistematika dokumen RKPD, yar	ng melip	uti:			
1.	Pembentukan tim penyusun					
	RKPD provinsi dan					
	penyusunan rencana kerja.					
2.	Pengolahan data dan					
	informasi.					
3.	Analisis gambaran umum					
	kondisi daerah					
4.	Analisis ekonomi dan					
	keuangan daerah.					
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.					
6.	Penelaahan terhadap	T = 0				
	kebijakan pemerintah.					
7.	Penelaahan pokok-pokok					
	pikiran Dewan Perwakilan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Waktu (Jam)		ı (Jam)	KKR	Ket.
VO		Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	Rakyat Daerah.					
8.	Perumusan permasalahan					
	pembangunan daerah.					
9.	Perumusan rancangan					
	kerangka ekonomi daerah dan					
	kebijakan keuangan daerah.					
10.	Perumusan RKPD sesuai			1.3		
	dengan visi, misi, arah					
	kebijakan dan program Kepala					
	Daerah yang ditetapkan dalam					
	RPJMD.					
11.	Perumusan sasaran dan					
et in the	prioritas pembangunan					
	daerah.					
10	Perumusan sasaran dan					
14.						
	prioritas pembangunan daerah					
	tahunan telah berpedoman					
	pada sasaran, strategi, arah					
	kebijakan dan program					
	pembangunan daerah.					
13.	Perumusan sasaran dan					
	prioritas pembangunan daerah					
	tahunan telah mengacu pada					
	Rancangan RKP.					
14.	Perumusan rencana kerja dan					
	pendanaan daerah.					
15.	Pelaksanaan forum konsultasi					
	publik.					
16.	Penyelarasan rencana kerja					
	dan pendanaan daerah.					
17.	Perumusan rencana kerja dan					
	pendanaan daerah dalam					
	rangka pencapaian sasaran					
	pembangunan jangka					
	pembangunan jangka					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	KKR	Vat	
INO	Langkan-Langkan Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	menengah daerah.					
18.	Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.					
19.	Rencana kerja dan pendanaan daerah telah memperhitungkan prakiraan maju.					
20.	Musrenbang RKPD yang bertujuan: a. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan. b. Menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah.					
21.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD.					
22.	Dokumen RKPD yang telah disahkan.					
23.	Buat Kesimpulan					

Kertas Kerja Reviu RKPD

1. Kertas Kerja Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		No.	KKR				
Kert	as kerja Reviu	Dist	ısun ol	eh/Tanggal			
		Dire	viu ole	h/Tanggal			
		Dise	tujui c	leh/Tanggal			
	Pengujian Atas Kelengkapan	Dokı	ımen I	Pendukung Rl	KPD		
No.	Uraian	ada	Tidak	Keterangan/	Analisis		
[1]	[2]	[3]	[4]]	5]		
1.	RPJMN			UU No			
3.	RKP Tahun			UU/PP No			
4.	RPJMD Provinsi	Perda No					
5.	Hasil Evaluasi RKPD tahun lalu	Pergub/SK N		lo			
6.	Rancangan Awal/Akhir RKPD	Terlampir					
7.	Berita Acara Musrenbang RKPD			BA No	•		
8.	Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD			Terlampir			
9.							
10.	Dstnya						
Ber	Berdasarkan wawancara dengan tim penyusun RKPD diketahui bahwa :						
	,Tgl-Bln-Thn						
			Nan	na:	•••		
			NIP				

- (1) Isikan No urut.
- (2) Isikan dokumen perencanaan.
- (3) Beri tick mark bila ada.
- (4) Beri tick mark bila tidak.
- (5) Beri penjelasan atas ada /tidaknya dokumen perencanaan.

Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD dan RPJMD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		No. KKR	
Kert	as kerja Reviu	Disusun oleh/Tanggal	
		Direviu oleh/Tanggal	
		Disetujui oleh/Tanggal	
Pe	ngujian Atas Kesesuaian Rumusan Dalam RKPI	Prioritas DAN Sasaran Pemba D dan RPJMD	ngunan
No.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam RKPD	Ket
	[1]	[2]	[3]
1.			
2.	Dst		
		,Tgl-Bln-Thn	
		Nama: NIP	

- (1) Isikan Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RPJMD.
- (2) Isikan Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD.
- (3) Beri penjelasan atas ketidaksesuaian.

3. Kertas Kerja Pengujian Atas Pembentukan Tim Penyusun RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		a	No. K	CKR	
Kertas kerja Reviu		Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal			
	Pengujian atas Pembe	ntuka	an Tim	Penyusun RKPD	
No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan/Anali	sis
	[1]	[2]	[3]	[4]	
1.	SK Tim Penyusun	ada		SK Gubernur NoTgl	
2.	Orientasi dan agenda kerja tim	ada		Jadwal terlampir	
3.	Pengumpulan data dan informasi	ada		Diantara lain : RPJMN RTRWN, RKP, hasil eva RKPD tahun lalu, RPJI Data-data statistik, Lk	aluasi MD,
				,Tgl-Bln-Thn	
			N	Iama: IP	

- (1) Isikan Uraian proses penyusunan RKPD.
- (2) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RKPD.
- (3) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RKPD.
- (4) Berikan keterangan.

4. Kertas Kerja Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		No. KKR				
Ker	tas kerja Reviu		Disusu	ın oleh/Tanggal		
			Direviu oleh/Tanggal			
			Disetu	jui oleh/Tanggal		
	Pengujian atas Analisis Ga	ambar	an Um	um Kondisi Daerah		
No.	Aspek		Hal	Catatan		
	[1]	[2]	[3]	[4]		
1.	Geografi dan demografi					
	 karakteristik lokasi dan wilayah potensi pengembangan wilayah wilayah rawan bencana demografi 					
2.	Kesejahteraan Masyarakat					
	kesejahteraan danpemerataan ekonomikesehateraan sosialseni budaya dan olah raga					
2.	Pelayanan umum					
	- fokus kayanan urusan wajib - fokus layanan urusan pilihan					
3.	Daya saing daerah					
	 fokus kemampuan ekonomi daerah fokus fasilitas wilayah/Insfrastruktur fokus iklim berinvestasi fokus Sumber Daya Manusia 					
		-		,Tgl-Bln-Thn		
				nma: P		

	100	1 1		
1.20	OFF	nh L	erro	١
PERT	Z IXC	m m	erja	١

- (1) Isikan Aspek gambaran umum kondisi daerah
- (2) Isikan Bab sesuai aspek
- (3) Isikan halaman sesuai aspek
- (4) Buat catatan

5. Kertas Kerja Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah

Insi	pektorat Provinsi/Kabupaten/Kota	No. KKR Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal			
Ker	tas kerja Reviu				
		Disetujui ole	h/Tan	iggal	
	Pengujian Atas Analisis Kesesuaian I	Kebijakan Nasid	nal D	engan	Daerah
No.	Aspek		Bab	Hal	Catatan
	[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Kebijakan Nasional (RPJMN/RKP) m a b. dst	eliputi:			
	Kebijakan dalam RKPD Provinsi a b. dst				
2.	Kebijakan lain yang dapat dipertang a b. dst	gungjawabkan			
Ber	dasarkan wawancara dengan Tim per	nyusun RKPD d	iketah	ui ba	hwa
		,	Tgl-Bl	n-Thr	1
		Nama: NIP			

- Isikan kebijakan pembangunan baik lingkup Nasional, RKPD, dan kebijakan lain
- (2) Isikan Bab sesuai aspek
- (3) Isikan halaman sesuai aspek
- (4) Buat catatan

6. Kertas Kerja Pokok Pokok Pikiran DPRD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		oupaten/Kota	No. KKR Disusun oleh/Tanggal				
Ker	Kertas kerja Reviu						
			Direviu ole	eh/Tangga	1		
			Disetujui				
	Pengu	jian Atas Pokok-F	okok Pikir	an DPRD			
No.	Program/Kegiatan	Indikator Kerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait		
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
1.							
2.	dst						
,Tgl-Bln-Thn						n	
	Nama: NIP						

- (1) Isikan Program/kegiatan yang merupakan pokok pokok pikiran DPRD
- (2) Isikan indicator kinerja program/kegiatan pokok pokok pikiran DPRD
- (3) Isikan volume kegiatan
- (4) Isikan Lokasi program/kegiatan
- (5) SKPD terkait pelaksana program/kegiatan pokok pokok pikiran DPRD

Kertas Kerja Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

N 13 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	oektorat Provinsi/K	abupaten/Kota	No. KKR					
Kert	as kerja Reviu		Disusun oleh	/Tangga	1,			
			Direviu oleh/	Direviu oleh/Tanggal				
			Disetujui olel	n/Tangga	al			
Р	engujian Atas Peny	oritas Da	erah Beserta					
No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih	OPD Penanggung Jawab			
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			
1.	PRIORITAS I a. PROGRAM PENDIDIKAN 1							
2.	PRIORITAS II a. PROGRAM 1 b. PROGRAM 1 2 c. DST							
				.,Tgl-Bln	-Thn			
			NID					

- (1) Isikan Program/kegiatan prioritas
- (2) Isikan pagu anggaran Program/kegiatan prioritas dalam RPJMD
- (3) Isikan pagu anggaran Program/kegiatan prioritas dalam RKPD
- (4) Isikan selisih yang terjadi
- (5) Isikan OPD penangung jawab program prioritas

8. Kertas Kerja Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja Sasaran dan Program dalam Rancangan Akhir RKPD dan RPJMD

2.70	nspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota			No. KKR			
Kertas k	terja Reviu		Disusun oleh/Tanggal				
			Direviu oleh/Tanggal				
			Disetujui oleh/Tanggal				
	ujian atas Konsiste saran dan Prograi			경기를 보았다. 이 경기를 위한다고 있다는 그 그리고 있다고 그리고 있다.			
No.	urusan/bidang urusan/program /kegiatan	indikator kinerja program (outcomes)/kegiatan (output)		target kinerja tahundi RPJMD (bab 9)	target kinerja tahundi RKPD		
	[1]	[2]		[3]	[4]		
1.	Wajib						
1.1	Pendidikan			-			
1.1.1	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM)		100 %	65 %		
1.1.1.1	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah	Jumlah sekolah yang terbangun		250	100		
	Dst						
1.2	Kesehatan						
1.2.1	Program						
1.2.1.1	Kegiatan						
1.3.	Dst						
2.	PILIHAN						
2.1.	PERTANIAN						
2.1.1	PROGRAM						
2.1.1.1	KEGIATAN						
	Dst						
	-			,Tgl-Bln-T	hn		
				ama: IP			

- (1) Isikan Program/kegiatan per Urusan
- (2) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan
- (3) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan dalam RPJMD
- (4) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan dalam RKPD

Catatan Hasil Reviu RKPD

KESESUAIAN RUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

	Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD (RPJMD Sub Bab 6.1.1)	Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD	CATATAN REVIU						
No			SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN	REKOMENDASI			
	Prioritas Pembangunan								
1	1992								
2									
3									
1	Sasaran Pembangunan	i	î î	i i	j				
1									
2									
3		-							

		tan	tat	Cal
--	--	-----	-----	-----

Kolom Sesuai dan Tidak Sesuai diisi dengan checklist

INSPEKTUR,

[Nama] [Pangkat] NIP.

KETIDAK SESUAIAN PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU PENDANAAN INDIKATIF ANTARA RANCANGAN AKHIR RKPD DENGAN RPJMD

No.	OPD	Program RKPD	Program RPJMD	Indikator Kinerja RKPD	Indikator Kinerja RPJMD	Target Kinerja Tahun () RKPD	Target Kinerja Tahun () RPJMD	ragu	Pagu RPJMD	Catatan Reviu	Rekomendasi
-1	Dinas ()										
2	Dinas ()										
3	Dinas ()						L				
4	dst, seluruh perangkat daerah										8
											8

INSPEKTUR

[NAMA] [Pangkat] NIP.

Laporan Hasil Reviu RKPD

KOP INSTANSI

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI (...) TAHUN (...)

I. DASAR HUKUM

[Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah, termasuk Surat Tugas Reviu]

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun (...)
- 4. Surat Tugas (...) Nomor (...) Tanggal (...)
- 5. dst

II. TUJUAN REVIU

[Berisi mengenai Tujuan Reviu]

III. RUANG LINGKUP REVIU

[Berisi mengenai Ruang Lingkup Reviu]

IV. METODOLOGI REVIU

[Berisi mengenai Metode yang Digunakan dalam Melaksanakan Reviu]

V. JANGKA WAKTU REVIU

[Berisi mengenai Jangka Waktu Reviu]

VI. SUSUNAN TIM REVIU

[Berisi mengenai Susunan Tim Reviu]

Penanggungjawab : Wakil Penanggungjawab : Pengendali Teknis : Ketua : Anggota :

VII. GAMBARAN UMUM

[Berisi mengenai Gambaran Umum Objek Reviu berupa Informasi Kondisi Perencanaan secara Umum]

VIII. URAIAN HASIL REVIU

[Berisi mengenai Uraian Hasil Reviu]

- A. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKPD
- B. KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RKPD DENGAN RPJMD
- C. PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RKPD

IX. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

[Berisi Simpulan dan Rekomendasi Reviu]

- A. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKPD
- B. KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RKPD DENGAN RPJMD
- C. PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RKPD

X. APRESIASI

[Berisi Apresiasi kepada Perangkat Daerah atas Kerjasamanya dalam Pelaksanaan Kegiatan Reviu]

INSPEKTUR,

[NAMA] [Pangkat] NIP.

4. Rencana Kerja (Renja)

a. Definisi

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

b. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

c. Tujuan

Untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya

d. Hal-Hal yang Direviu

- 1) Kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat Daerah dengan informasi dalam RKPD; dan
- 2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan

e. Tahapan

- 1) Perencanaan Reviu, terdiri dari:
 - i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu;
 - ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
 - iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan
 - iv. Penetapan tim reviu
- 2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.
- Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah memuat Catatan Hasil Reviu

f. Format

Program Kerja Reviu Renja

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAP. AKHIR RENCANA KERJA PERAN Tujuan: untuk menguji bahwa Daerah yang disusun telah didu memadai.	NGKAT D	AERAH. an akhir r	encana ke	rja Per	angkat
	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi: a. RKPD; b. laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya; c. berita acara Musrenbang kecamatan; d. berita acara forum Perangkat Daerah; e. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan f. dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu.					
2	Buat Kesimpulan					
В	PENGUJIAN ATAS KESESU PERANGKAT DAERAH DENG DAERAH Tujuan: Untuk menguji rum	GAN R	RANCANO ENCANA rancangan	KERJA I	PEMER	RENJA RINTAH kerja

NI.	London London Vario Dario	Dilaks	Waktu	KKR	Ket.		
No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.	
	Perangkat Daerah telah berpe Daerah	doman	pada ren	cana kerja	Peme	erintah	
1	Analisis rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD.						
2	Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggungjawab pada Bab IV rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dengan Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.						
3	Buat kesimpulan.						
С	PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah						
	Lakukan permintaan keteranga sistematika dokumen Renja Pera					an dan	
1.	Pembentukan tim penyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.						

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
110	bangkan bangkan Kerja Kevia	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	not.
2.	Pengolahan data dan informasi.					
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.					
4.	Mengkaji hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.					
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah					
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.					
7.	Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.					
8.	Penelaahan usulan masyarakat.					
9.	Perumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah					
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.					
11.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang.					
12.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
13.	Mensinkronkan program dan kegiatan antarperangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.					
14.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu anggaran untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan surat edaran kepala daerah.					
15.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.					
16.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.					
17.	Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.					

Kertas Kerja Reviu Renja

 Kertas Kerja Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja

	ektorat Provinsi/Kabupaten/Kota	No. KKR					
Kert	as kerja Reviu	Disusun	oleh/7	anggal			
		Direviu o	leh/Ta	anggal			
		Disetujui oleh/Tanggal					
	Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RENJA						
No.	Uraian		Ada	Tidak	Keterangan/ Analisis		
	[1]		[2]	[3]	[4]		
1.	Renstra						
3.	RKPD						
4.	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu						
5.	Berita Acara Musrenbang						
6.	Berita Acara Forum SKPD						
7.	Rancangan Awal RKPD						
8.	Laporan hasil pengendalian kebijal penyusunan Renja	kan					
9.	Berita acara verifikasi rencangan a	wal renja					
10.	Dstnya						
Bero bah	dasarkan wawancara dengan Tim pe wa :	enyusun R	encan	a Kerja	diketahui		
			Т	`gl-Bln-	Thn		
				G			

- (1) Isikan dokumen perencanaan.
- (2) Beri tick mark bila ada.
- (3) Beri tick mark bila tidak.
- (4) Beri penjelasan atas ada/tidaknya dokumen perencanaan.

2. Kertas Kerja Kesesuaian Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan Renstra

	nspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota	No. KKR		
Kert	as kerja Reviu	Disusun oleh/Tanggal		
		Direviu oleh/Tanggal		
		Disetujui oleh/Tanggal		
	Pengujian atas Kesesuaian Ranca	angan Akhir Renja Dengan R	enstra	
No.	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renstra	Rumusan Sasaran OPD D Renja	Ket	
	[1]	[2]		[3]
1.				
2.				
3.	Dst			
		,Tgl-Bln-Th	ın	
		Nama: NIP		

- (1) Isikan sasaran OPD dalam Renstra.
- (2) Isikan Rumusan sasaran OPD dalam rencana kerja.
- (3) Beri penjelasan atas ketidaksesuaian.

3. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota			No. KKR				
as kerja Reviu			Disusun oleh/Tanggal				
			Direviu oleh/Tanggal				
			Disetujui oleh/Tanggal				
Pengujian Atas Penyus	unar	Substa	ansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja				
Uraian	Ada	Tidak	Keterangan/Analisis				
[1]	[2]	[3]	[4]				
SK Tim Penyusun	ada		SK Gubernur NoTgl				
Orientasi dan agenda kerja tim	ada		Jadwal terlampir				
Pengumpulan data dan informasi	ada		antara lain : RKPD, Renstra, hasii evaluasi Renja tahun lalu, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, Data-data statistik LkjIP, tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis				
			,Tgl-Bln-Thn				
	Pengujian Atas Penyus Uraian [1] SK Tim Penyusun Orientasi dan agenda kerja tim Pengumpulan data	Pengujian Atas Penyusunan Uraian Ada [1] [2] SK Tim Penyusun ada Orientasi dan agenda ada kerja tim Pengumpulan data ada	Pengujian Atas Penyusunan Substa Uraian Ada Tidak [1] [2] [3] SK Tim Penyusun ada Orientasi dan agenda ada kerja tim Pengumpulan data ada	Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja Uraian Ada Tidak Keterangan/Analisis [1] [2] [3] [4] SK Tim Penyusun ada SK Gubernur NoTgl Orientasi dan agenda ada Jadwal terlampir kerja tim Pengumpulan data ada antara lain : RKPD, Renstra, h evaluasi Renja tahun lalu, hasil evalu RKPD tahun lalu, Data-data statis LkjIP, tabel-tabel/matrik kompilasi d yang sesuai dengan kebutuhan analisis			

- (1) Isikan Uraian proses penyusunan RENJA
- (2) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RENJA
- (3) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RENJA.
- (4) Berikan keterangan.

4. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja

ktorat Provinsi/Kabu	noton /Koto	NI - 17171	D			
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		No. KKR				
s kerja Reviu		Disusu	gal			
		Direviu oleh/Tanggal				
			ui oleh/Tang	gal		
enguiian atas Analisi	e Kesesusiar			Correspondent and the	Daerah	
	o moscodom.	ricona	tair ivasionar	Dengan	Daoran	
Rumusan Tujuan Dalam Renstra			Kebijakan Nasional	Rumusan Tujua Dalam Renja		
[1]	[2]		[3]	[4]		
123.01			10.00			
Dstnya		e Saldadai				
musan sasaran:						
	D		Dayman Ca		alam Dani	
Dalam Renstra			Rumusan Sa	asaran d	alam Kenja	
[1]	[2]			[3]		
20.00				30 37		
DSTNYA						
	***	,Tgl-	Bln-Thr	1		
	engujian atas Analisi musan Tujuan: Rumusan Tujuan Dalam Renstra [1] Dstnya Berdasarkan wawan Berdasarkan wawan Rumusan Tujuan Dalam Renstra	engujian atas Analisis Kesesusiar musan Tujuan: Rumusan Tujuan Hasil Eva Kinerja Pel [1] [2] Dstnya Berdasarkan wawancara dengan musan sasaran: Rumusan Tujuan Rumus Dalam Renstra Sasaran Re [1] [2]	Disusu Direviu Disetuj engujian atas Analisis Kesesusian Kebijak musan Tujuan: Rumusan Tujuan Hasil Evaluasi Dalam Renstra Kinerja Pelayanan [1] [2] Dstnya Berdasarkan wawancara dengan Tim per musan sasaran: Rumusan Tujuan Rumusan Dalam Renstra Sasaran Renstra [1] [2] DSTNYA	Distustin den/ Tangga Direviu oleh/Tangga Disetujui oleh/Tangga Disetujui oleh/Tangga musan Tujuan: Rumusan Tujuan Hasil Evaluasi Kebijakan Nasional [1] [2] [3] Dstnya Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun Renja musan sasaran: Rumusan Tujuan Rumusan Rumusan Sasaran Renstra [1] [2] Dstnya Dstnya Dalam Renstra [1] [2] Dstnya Dstnya Rumusan Rumusan Sasaran Renstra [1] [2] Dstnya Dstnya Rumusan Rumusan Sasaran Renstra [1] [2] Dstnya Dstnya Rumusan Rumusan Sasaran Renstra [1] [2] Dstnya Nama:	Distustin olen/ Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal engujian atas Analisis Kesesusian Kebijakan Nasional Dengan musan Tujuan: Rumusan Tujuan Hasil Evaluasi Kebijakan Rumus Dalam Renstra Kinerja Pelayanan Nasional Dala [1] [2] [3] Dstnya Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun Renja diketa musan sasaran: Rumusan Tujuan Rumusan Rumusan Sasaran dana Renstra [1] [2] [3] Dstnya Dstnya Bumusan Rumusan Rumusan Sasaran dana Renstra [1] [2] [3]	

Langkah kerja:

Perumusan tujuan:

- (1) isikan rumusan tujuan dalam renstra.
- (2) isikan hasil evaluasi kinerja pelayanan.
- (3) isikan kebijakan nasional.
- (4) isikan rumusan tujuan dalam renja.

Perumusan sasaran:

- (1) isikan rumusan tujuan dalam renstra
- (2) isikan rumusan sasaran renstra
- (3) isikan rumusan sasaran dalam renja

5. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu					
			Disusun oleh/Tanggal		
			leh/Tanggal		
			oleh/Tanggal		
		100000000000000000000000000000000000000		an Program	
Program/Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD	Usulan Hasil Musrenbang [2]		Program/Kegiat an Dalam Renja	Keterangan	
[1]			[3]	[4]	
71 %	9,000		77-11	8:34	
Dstnya					
- Indiana - Indi			,Tgl-Bln-Th	n	
	s kerja Reviu ngujian Atas Menyelaraskan P dan Kegia Program/Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD	Disus Direv Diset ngujian Atas Menyelaraskan Program dan dan Kegiatan Hasil M Program/Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD Musrenba	Disusun Direviu o Disetujui ngujian Atas Menyelaraskan Program dan Keg dan Kegiatan Hasil Musre Program/Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD [1] Dstnya Disusun Disusun	Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal	

- Isikan Program/dalam Rancangan awal RKPD
- (2) Isikan Usulan hasil musrenbang
- (3) Isikan Program/kegiatan dalam rencana kerja
- (4) Isikan keterangan

6. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota			No. KI	No. KKR					
Kert	as kerja Reviu	ı		Disus					
				Direvi	Direviu oleh/Tanggal				
				Disetu	Disetujui oleh/Tanggal				
Pe	engujian Atas	Penyelaras		na Prograz likatifnya	n Prioritas Daera	h Beserta	Pagu		
No.	SKPD/OPD	Program/kegiatan				Lebih/ kurang	Ket		
	[1]	[2	2]	[3]	[4]	[5]	[6]		
		Program	Kegiatan						
1									
2	dst								
			1		,Tgl-Bln	-Thn			
				Nama: NIP					

- (1) Isikan SKPD/OPD.
- (2) Isikan Program/kegiatan.
- (3) Isikan Pagu indikatif.
- (4) Isikan Pagu indikatif sesuai dengan Surat Edaran Kepala Daerah.
- (5) isikan lebih atau kurang.
- (6) Keterangan.

Catatan Hasil Reviu Renja

CATATAN HASIL REVIU RENJA DINAS (...) TAHUN (...)

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Α.	KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN () DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ()			
	Kesesuaian Sasaran			
	2. Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub kegiatan			
	Kesuaian Indikator dan Target			
	Kesesuaian Pagu Dana			
	5. Hal- hal menjadi perhatian			
В.	KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BAB III RENCANA KERJA DI DASARKAN PADA:			
	Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah			
	Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah			
C.	KESESUAIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH Kesesuaian Sistematika Perubahan Rencana kerja dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat a. Pendahuluan; b. Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; e. Penutup.			
D.	KELENGKAPAN DOKUMEN			

*) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan

(Tempat), (Tangg	d Bulan Tahun)
------------------	----------------

KEPALA DINAS

INSPEKTUR PEMBANTU (...)

(NAMA) (Pangkat) NIP. (NAMA) (Pangkat) NIP.

Laporan Hasil Reviu Renja

KOP INSTANSI

(Tempat), (Tanggal Bulan Tah

Nomor : Sifat : Lampiran :

Lampiran : 1 (berkas)

Perihal : Laporan Hasil Reviu Renja Tahun (...)

Kepada Yth. Dinas (...) Provinsi (...) Di (Tempat)

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Tahun (...) pada Dinas (...). Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan hasil sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, selanjutnya Perangkat Daerah melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun oleh Tim Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor Tim bertugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan reviu Rencana Kerja Tahun (...) Dinas (...) Adapun reviu dilaksanakan pada saat penyusunan Rancangan Akhir Renja oleh Dinas (...) sebelum ditetapkannya RKPD Tahun (...).

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat ketidaksesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun (...) dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun (...) untuk Sasaran, Program/Kegiatan/Sub kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja, Pagu Dana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan (kalau memang ditemui/ sesuaikan)
- b. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas (...) dengan Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- c. Kesesuaian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Dinas (...)

Sistematika Penyajian Rencana Kerja Tahun (...) yang disusun Dinas (...) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat:

- Pendahuluan;
- Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- Penutup

Dari hasil reviu tersebut di atas, Dinas (...) telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu]. Dinas (...) telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada Rencana Kerja Tahun (...) dengan mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan (CHR terlampir).

2. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- c. Surat Edaran (...)
- d. Surat Edaran Gubernur (...)
- a. Keputusan Gubernur (...)

3. TUJUAN REVIU

Memastikan bahwa rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

4. RUANG LINGKUP REVIU

Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas (...) dilakukan mencakup pengujian terhadap penyusunan dokumen Rencana Kerja untuk Tahun (...).

5. METODOLOGI REVIU

- Reviu Renja Tahun (...) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan data/dokumen terkait dengan rencana kerja dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana kerja serta wawancara dengan petugas terkait proses penyusunan rencana kerja.
- Reviu dilaksanakan mulai dari tanggal (...) berdasarkan Surat Tugas (...) dengan susunan Tim sebagai berikut:
 - 1. Penanggung jawab :
 - Wakil Penanggung Jawab :
 - 3. Pengendali Teknis :
 - 4. Ketua Tim
 - 5. Anggota Tim :

6. URAIAN HASIL REVIU

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sudah menggunakan website https://sipd-ri.kemendagri.go.id. Dinas (...) telah menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun (...) dengan mempedomani Rancangan Akhir RKPD Tahun (...).

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

I. Kesesuaian BAB III Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas (...) Tahun (...) dengan BAB IV dan BAB VI Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun (...)

Sesuaikan dengan catatan hasil reviu

a. ...

b. ...

II. Kesesuaian Tujuan Dan Sasaran, Program Dan Kegiatan Pada BAB III Rencana Kerja Dinas (...)

Sesuaikan dengan catatan hasil reviu

- III. Kesesuaian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Dinas (...)
 - Sistematikan Penyusunan Rencana Kerja Tahun (...) Dinas (...) telah sesuai dengan maksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
 - Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah Sesuaikan dengan catatan hasil reviu

7. REKOMENDASI HASIL REVIU

Berdasarkan hal tersebut di atas, direkomendasikan kepada Dinas (...) sebagai berikut: (sesuaikan dengan CHR)

a....

b....

Demikian Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Tahun (...) pada Dinas (...) ini disampaikan, sebagai saran perbaikan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun (...).

INSPEKTUR,

(NAMA) (Pangkat) NIP.

5. Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

a. Definisi

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan

c. Tujuan

Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

d. Hal-Hal yang Direviu

- Kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, dengan informasi dalam RKPD; dan
- 2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.

e. Tahapan

- 1) Perencanaan Reviu, terdiri dari:
 - i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu;
 - ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
 - iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan
 - iv. Penetapan tim reviu

- 2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.
- 3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu

f. Format

Program Kerja Reviu KUA-PPAS

M-	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	Waktu (Jam)		17.4
No	Langkan-Langkan Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAP KUA-PPAS. Tujuan: untuk menguji bahwa didukung dengan dokumen pere	rancang	an KUA-Pl	PAS yang o		
1	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi: a. RKPD; b. Dokumen Lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu.					
2	Buat Kesimpulan					
В	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN Tujuan: Untuk menguji rumu berdasarkan RKPD				ija.	
1	Analisis rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA-PPAS telah sesuai dengan Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD.					
2	Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaranpenerima	5				

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR No.	Ket.
NO	Langkan-Langkan kerja keviu	Oleh	Rencana	Realisasi		
	manfaat per-kegiatan setiap perangkat daerah serta perangkat daerah penanggungjawab dalam rancangan KUA-PPAS, dengan Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.					
3	Analisis kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan antara rancangan KUA-PPAS dengan Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah RKPD.					
4	Buat kesimpulan.					

Kertas Kerja Reviu KUA-PPAS

1. Kertas Kerja Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung KUA-PPAS:

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota			No. KKR					
Kert	as kerja Revi	1	D	Disusun oleh/Tanggal				
			D	irev				
				iset	tujui olel	n/Tanggal		
	Pengujian	Atas Kelengkapan D	oku	mer	n Penduk	rung KUA/F	PPAS	
No.	D	okumen	Ada	a	Tidak	Ketera	angan	
[1]		[2]	[3]		[4]	[5	5]	
1	RPJMD		V					
2	RKPD		V					
3	RENSTRA - S	SKPD						
4	RENJA - SKI	PD						
	1) Program	: Buah						
	2) Kegiatan	: Buah						
KES	SIMPULAN / C	CATATAN:						
1								
			•••••					
2								
				••		.,Tgl-Bln-Th	n	
					Nama:			
					NIP			

- (1) Isikan No urut
- (2) Isikan dokumen perencanaan.
- (3) Beri tick mark bila ada
- (4) Beri tick mark bila tidak
- (5) Beri penjelasan atas ada /tidaknya dokumen perencanaan

 Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Rancangan KUA-PPAS Dengan RKPD dan RPJMD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		en/Kota	No. KI	KR	
Kert	as kerja Reviu		Disus	un oleh/Tanggal	
			Direviu oleh/Tanggal		
				ıjui oleh/Tanggal	
	engujian Atas Kesesuaian erah Dalam Rancangan K				
No	Prioritas	Dan Sasa	ran Per	nbangunan Daeral	n
	KUA/PPAS	RK	PD	RPJMD	KET
	[1]	[2	2]	[3]	[4]
1.	contoh:				Sesuai/Tidak
	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah	Sesuai
1			ıktur	Pemerataan Infrasruktur Wilayah	Sesuai
)	,Tgl-Bln-	Thn
				Nama: NIP	***

- (1) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan KUA/PPAS
- (2) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RKPD
- (3) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD
- (4) Beri keterangan sesuai/tidak

3. Kertas Kerja Kesesuaian Antara Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Rancangan Akhir RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kot Kertas kerja Reviu		ten/Kota	No. KK	(R	
			Disusu	ın oleh/Tanggal	
			Direvi	ı oleh/Tanggal	
				jui oleh/Tanggal	
Pe	engujian Atas Kesesuaiar Dalam Ranvangan				
No		Program ,	/Kegiata	an Pioritas	
	Prioritas	KUA/I	PPAS	RKPD	KET
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	contoh:				Sesuai/Tidak
	Prioritas Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah	Program Perencanaan Tata Ruang		Program Perencanaan Tata Ruang	Sesuai
		Program pengemb wilayah strategis cepat tur	dan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Sesuai
			0	,Tgl-Bln-	Thn
				Nama:	(#E)

- (1) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- (2) Isikan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD
- (4) Beri keterangan sesuai/tidak

4. Kertas Kerja Kesesuaian Proyeksi Fiskal Dalam Rancangan KUA-PPAS Dengan Rancangan Akhir RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Ko Kertas keria Reviu		en/Kota	No. K	KR	
Kertas kerja Reviu			Disus	un oleh/Tanggal	
	********		Direvi	u oleh/Tanggal	
			Diset	ujui oleh/Tanggal	
1	Pengujian Atas Kesesuaia Deng			l Dalam Rancanga khir RKPD	n KUA-PPAS
No			yeksi F		
	Uraian	KUA/I	*	RKPD	KET
	[1]	[2	!]	[3]	[4]
1.	contoh:				Sesuai/Tidak
	Pendapatan				
	- PAD				
	- Transfer				
	Belanja				
	- Belaja pegawai				
	- Belanja Barang Jasa				
	- Belanja Modal				
	- Bantuan Sosial				
	Surplus/defisit				
	Pembiayaan				
	- Penerimaan				
	- Pengeluaran				
		,		,Tgl-Bln	-Thn
				Nama: NIP	

- (1) Isikan Uraian pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Isikan Nilai pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan Nilai pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan RKPD
- (4) Berikan Keterangan atas kesesuaian/ketidaksesuaian

5. Kertas Kerja Kesesuian/Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja, Sasaran Program Dan Kegiatan Dalam Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Akhir RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		ota No.	KKR			
Ker	Kertas kerja Reviu	Dis	usun oleh	/Tanggal		
		Dire	eviu oleh/	Tanggal		
			Dis	etujui olel	n/Tanggal	
	ngujian Atas Kese erja, Sasaran, Pr					THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN
	Pagu Da	ana Program	Dan Kegia	tan Antai	ra Rancang	an
No.	Uraian SKPD	KUA/	PPAS	R	KPD	KET
		Prog/Keg	Target Kinerja/ Indikator	Prog/ Keg	Target Kinerja/ Indikator	Sesuai/Tidak
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Dinas	Prog		Prog		
		Keg		Keg		
2	Badan	Prog		Prog	******	
		Keg		Keg		
					,Tgl-Bln-	
						••

- (1) Isikan Badan/Dinas/SKPD
- (2) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan Target kinerja program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (4) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (5) Isikan Target kinerja program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (6) Berikan keterangan

6. Kertas Kerja Kesesuaian Pagu Dana Program Kegiatan Dalam Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Akhir RKPD

	ektorat Provinsi/	Kabupaten/K	ota N	lo. I	KKR		
Kert	Kertas kerja Reviu				sun oleh		
					viu oleh/	Tanggal	
			E	Dise	tujui olel	n/Tanggal	
Pen	gujian Atas keses		lana Pro PAS den			egiatan an	tara rancangan
	Pagu D	ana Program	dan Keş	giata	an Antai	a Rancang	an
No. Uraian SKPD KUA/PPAS					R	KPD	KET
		Prog/Keg	Target Kinerja Indikat	a/	Prog/ Keg	Target Kinerja/ Indikator	Sesuai/Tidak
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]
1	Dinas	Prog	******		Prog	******	
		Keg			Keg		
2	Badan	Prog			Prog	******	
		Keg			Keg		
						,Tgl-Bln-'	
							OCTI SIAN

- (1) Isikan Badan/Dinas/SKPD
- (2) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan pagu anggaran program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (4) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (5) Isikan pagu anggaran program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (6) Berikan keterangan

Catatan Hasil Reviu KUA-PPAS

Tabel 1 Perbedaan Pagu Indikatif antara RKPD Tahun (...) dengan Rancangan Awal KUA PPAS Tahun (...)

No	SKPD / Program	RKPD	KUA	Selisih
1				
2				
3				
	Total			

Tabel 2 Ketidaksesuaian Alokasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun (...) dengan Rancangan Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) Tahun (...)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Program / Kegiatan / S Kegiatan			
		RKPD (Rp)	PPAS (Rp)		
1					
2		-	1		
3					

Tabel 3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Target namun Alokasi Anggaran Tersedia

OPD / UPTD	Program / Kegiatan	Target	Plafon Anggaran Sementara
34			8

Tabel 4 Kegiatan / Sub Kegiatan yang Memiliki Target Ouput tapi Pagu Anggaran Tidak Tersedia (Nihil)

OPD / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja
		-

Tabel 5 Perbedaan Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan pada PPAS Tahun (...) dengan Target yang Ditetapkan pada RKPD Tahun (...)

OPD / UPTD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target PPAS	Target RKPD
-			

Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS

KOP INSTANSI

(Tempat), (Tanggal Bulan Tahun)

Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal :

Yth. Kepala Perangkat Daerah Di tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun (...), dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu sebagai berikut:

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

[Berisi mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]
Inspekrorat Daerah Provinsi (...) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan Reviu terhadap Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun (...) berupa kesesuaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator dan Target Kegiatan/Sub Kegiatan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun (...) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun (...).

Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinanterbatas mengenai kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun (...) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun (...) dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dalam pelaksanaan reviu kami telah melakukan serangkaian aktivitas berupa kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun (...) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun (...) dan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

II. DASAR HUKUM

[Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu dokumen KUA-PPAS dan Renja Perangkat Daerah]

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 3. Peraturan Gubernur terkait Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun (...)

- 4. Keputusan Gubernur terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi (...) Tahun (...)
- 5. dst

III. TUJUAN REVIU

[Berisi mengenai Tujuan Reviu]

IV. RUANG LINGKUP REVIU

[Berisi mengenai Ruang Lingkup Reviu]

V. METODOLOGI REVIU

[Berisi mengenai Metode yang Digunakan dalam Melaksanakan Reviu, Surat Tugas dan Susunan Tim Reviu]

VI. URAIAN HASIL REVIU

[Berisi mengenai Uraian Hasil Reviu]

VII. REKOMENDASI HASIL REVIU

[Berisi mengenai Rekomendasi Reviu]

Tanggung jawab Tim Reviu terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Badan Penglolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi. Tanggung jawab penuh terhadap kebenaran isi dan substansi dokumen KUA-PPAS Tahun (...) berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS Tahun (...) disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

[NAMA] [Pangkat] NIP.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

a. Definisi

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

c. Tujuan

Untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya

d. Hal-Hal yang Direviu

- Kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dengan informasi dalam KUA dan PPAS; dan
- 2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran

e. Tahapan

- 1) Perencanaan Reviu, terdiri dari:
 - i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu;
 - ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
 - iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan
 - iv. Penetapan tim reviu
- 2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.
- 3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu

f. Format

Program Kerja Reviu RKA-SKPD

NI	Landrah Landrah Varia Davis	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Vot
No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPA Tujuan: untuk menguji bahw perangkat daerah telah diduku memadai.	a RKA-	SKPD yar	ng diajuka	n olel	n tiap
1	Dapatkan Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan Meliputi: a. Dokumen Umum: 1) KUA Dan PPAS; 2) RKA-SKPD; 3) Pedoman Penyusunan APBD; 4) Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD; 5) Term Of Refference (TOR) Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6) Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Belanja Dan Bagan Akun Standar; 7) Hasil Evaluasi Atas RAPBD Tahun Lalu Dari Menteri Dalam Negeri Untuk Provinsi Dan Gubernur Untuk Bupati Kepada PPKD;					

NI.	Landah Landah Kada Bada	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Vet
No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	8) Hasil Audit BPK Dan					
	Hasil Pengawasan APIP					
	Tahun Anggaran					
	Sebelumnya; Dan					
	9) Dokumen Lainnya Yang					
	Dibutuhkan Dalam					
	Pelaksanaan Reviu.					
	b. Dokumen Pengalokasian					
	Anggaran Terkait					
	Pengadaan Barang Milik					
	Daerah:					
	1) Pengadaan Tanah:					
	a) Data/dokumen					
	Rencana Kebutuhan					
	Tahunan BMD;					
	b) Status Kepemilikan					
	Tanah;					
	c) Informasi harga					
	tanah/NJOP dari					
	Dinas Pendapatan					
	Daerah setempat;					
	d) Keterangan dari					
	Camat setempat					
	apabila harga tanah					
	lebih besar dari					
	NJOP; dan					
	e) Izin Prinsip					
	pembangunan					
	Gedung dari					
	Pemerintah Daerah.					
	2) Pembangunan					
	Bangunan/Gedung					
	Daerah:					
	a) Data/dokumen					

No	Langlah Langlah Varia Daria	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	Rencana Kebutuhan					
	Tahunan BMD untuk					
	tanah dan/atau					
	bangunan;					
	b) Izin Prinsip					
	pembangunan gedung					
	dari Pemerintah					
	Daerah (IMB);					
	c) Status Kepemilikan					
	tanah; dan					
	d) Surat Dinas PU					
	terkait perhitungan					
	kebutuhan biaya					
	pembangunan gedung					
	atau sejenisnya untuk					
	Pengadaaan					
	Gedung/Bangunan.					
	3) Pengadaan asset lainnya,					
	(misalnya: kendaraan					
	dinas dan renovasi					
	gedung):					
	a) Surat Keterangan,					
	Berita Acara					
	Penghapusan					
	Kendaraan; dan					
	b) Surat dari Dinas PU					
	terkait perhitungan					
	kebutuhan biaya					
	renovasi gedung					
	negara/ sejenisnya.					
	4) Dokumen pengalokasian					
	anggaran terkait					
	pemeliharaan BMD:					
	a) Peraturan Kepala					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
10	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	Daerah tentang Standar Biaya; b) Data Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk mengetahui luas, jumlah, dan kondisi BMD; c) Data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan; dan d) Jumlah pegawai dan struktur organisasi					
В	satuan kerja PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN Tujuan: untuk menguji kesesu SKPD yang diajukan oleh tiap pe	aian pr	ogram dar	n kegiatan		ı RK/
1	Pastikan kesesuaian total pagu program dan kegiatan antara PPAS dengan pagu dalam RKA- SKPD.					
2	Pastikan konsistensi nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima manfaat per-kegiatan setiap Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah penanggung jawab yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD dengan dokumen PPAS.					
3	Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada RKA-SKPD yang tidak terdapat dalam					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
VO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	KCt.
	PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pastikan penambahan kegiatan baru tersebut akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah PPAS					
4	ditetapkan. Buat kesimpulan.				1	
С	PROGRAM KERJA REVIU RKA-S BELANJA TIDAK LANGSUNG Tujuan: untuk memastikan bahv 1. telah sesuai dengan Standar 2. telah dilengkapi dokumen per	wa penga Biaya; da	anggaran b an			
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan belanja: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga. Dalam RKA SKPD dengan standar biaya terkait.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
2	angka/analisis atas kesesuaian belanja tidak langsung dengan dokumen pendukung TOR, hasil verifikasi Hibah/bansos/bantuan keuangan dan dokumen pendukung lainnya antara lain proposal Surat Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima dana hibah dan bansos (by name by address)					
3	Pastikan penganggaran belanja hibah dan bansos didukung dengan dasar hukum penganggarannya.					
4	Buat Kesimpulan					
D	PROGRAM KERJA REVIU RKA-S BELANJA BARANG DAN JASA. Tujuan: untuk memastikan baha 1. Telah mempertimbangkan ker 2. Telah sesuai dengan Standar 3. Telah dilengkapi dokumen per	wa belan tersediaa Biaya; d	ja barang/ an anggara lan	jasa.	ANGO	GARAN
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan biaya belanja belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,					

NI-	Langkah Langkah Veris Deriv	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	77-4
No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai dengan dalam RKA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah					
2	Lakukan analisis/penelaahan atas kesesuaian belanja barang/jasa dokumen pendukung TOR, laporan Persediaan Bahan habis pakai dan dokumen pendukung lainnya.					
3	Buat Kesimpulan.					
Е	PROGRAM KERJA REVIU RKA-S TERKAIT PENGADAAN BA GEDUNG/BANGUNAN Tujuan: untuk memastik gedung/bangunan: 1. Telah sesuai dengan rencana 2. Telah mempertimbangkan	ARANG an l kebutul	MILIK pahwa nan;	LOKASIAN DAERA rencana	H U	GARAN UNTUK adaar telah

3. Telah sesuai dengan Standar Biaya; dan

4. Telah dilengkapi dokumen pendukung.

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
.,,	Dangkan Dangkan Kerja Keria	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	200000
1	Lakukan penelusuran angka/analisis kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana pengadaan.					
2	Teliti apakah SPTJM telah memuat: a. pernyataan telah memenuhi kelayakan teknis; dan b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top).					
3	Khusus untuk kontrak tahun jamak, pastikan apakah atas permohonan kontrak tahun jamak telah mendapat pesertujuan Kepala Daerah.					
4	Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan/pengadaan lahan seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar, antara lain bandara, pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, pastikan apakah SPTJM Telah dilampiri: a. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menyelesaikan					

No	Landrah Landrah Paris Daris	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
NO	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	pengadaan/pembebasan lahan/tanah secara simultan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam periode Kontrak Tahun Jamak; b. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana; c. pernyataan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/tanah tidak dapat dibebankan pada APBD, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
5	Pastikan apakah telah terdapat perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan					

NI.	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR	**
No			Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	Umum No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/ gedung Negara.					
6	Pastikan apakah telah terdapat analisis kebutuhan mengenai rencana pengadaan Gedung/ bangunan yang diusulkan oleh Satuan Kerja					
7	Pastikan bahwa dokumen pendukung yang diajukan: a. dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun; b. tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang.					
8	Buat kesimpulan.					
F	PROGRAM KERJA REVIU RKA-S TERKAIT PENGADAAN BARANG					GARA!

Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran pengadaan tanah:

- 1. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan;
- dan telah 2. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran memperhatikan ketersediaan BMND yang ada pada Badan/Biro/Bagian aset; dan

NT.	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu	ı (Jam)	KKR	Ket.
No	Langkan-Langkan Kerja Reviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	3. Telah dilengkapi dokumen pe	ndukun	g.			
1	Dapatkan dan pelajari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dibuat oleh satker, pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah didasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang dan memperhatikan ketersediaan LBMD/KIB, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, yang ada pada Badan/Biro pengelola asset.					
2	Pastikan kesesuaian TOR, RAB, dan SPTJM dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah.					
3	Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium dengan standar biaya sesuai Petauran Kepala Daerah tentang Standar Harga					
4	Buat kesimpulan.					
G	PROGRAM KERJA REVIU RKA BERMOTOR. Tujuan: untuk memastikan ap sesuai dengan kebutuhan.					GV LEVAS N
1	Bandingkan antara jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh satuan kerja serta kondisinya dalam LBMD/KIB,					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu Dilaks Waktu ((Jam)	KKR	Ket.		
NO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	dengan jumlah jabatan dalam					
	struktur organisasi satuan					
	kerja tersebut.					
2	Untuk penggantian kendaraan					
	yang rusak berat yang secara					
	ekonomis memerlukan biaya					
	pemeliharaan yang besar					
	untuk selanjutnya harus					
	dihapuskan dari daftar					
	inventaris dan tidak diusulkan					
	biaya pemeliharaannya,					
	pastikan terdapat Surat					
	Keterangan berupa Berita					
	Acara Penghapusan					
	kendaraan/Pelelangan.					
3	Untuk pengadaan kendaraan					
	bermotor yang dibatasi,					
	pastikan apakah terdapat surat					
	izin dari pimpinan K/L					
4	Buat kesimpulan.					
Н	PROGRAM KERJA REVIU RKA-S	SKPD AT	AS PENGA	LOKASIAN	ANGO	GARAN
	BIAYA PEMELIHARAAN KENDAR	RAAN BE	RMOTOR			
	Tujuan: untuk memastikan apa	kah biay	a pemelih	araan ken	daraan	dinas
	telah sesuai dengan jumlah kend	laraan d	inas/kapa	l dan stand	lar bia	ya.
1	Lakukan penelaahan atas					
	kesesuaian dokumen TOR dan					
	RAB.					
2	Lakukan pengujian kesesuaian					
	biaya pemeliharaan kendaraan					
	dengan jumlah kendaraan					
	dinas yang kondisinya tidak					
	rusak berat sesuai LBMD/KIB.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
IVO	Langkan-Langkan Kerja Keviu	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	IXC.
3	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan standar biaya.					
4	Buat kesimpulan.					
I	PROGRAM KERJA REVIU RKA-S Tujuan: untuk memastikan Bangunan telah sesuai dengan S	apakah	Biaya R			g daı
1	Lakukan penelaahan kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana renovasi gedung.					
2	a. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar daerah (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; b. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
110	Dangkan-Dangkan Kerja Kevid	Oleh	Rencana	Realisasi	No.	MCt.
	konsultan perencana setempat dan SPTJM KPA kantor perwakilan setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar provinsi (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan. (Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut).					
3	Buat Kesimpulan.					
J	PROGRAM KERJA REVIU RKA-S BIAYA PEMELIHARAAN GEDUN Tujuan: untuk memastikan ba dipergunakan bersama tidak terj	G YANG ahwa bi	DITEMPAT iaya peme	TI BERSAM liharaan {	A. gedung	
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB			,		
2	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dengan standar biaya					
3	Lakukan analisis apakah terdapat duplikasi biaya pemeliharaan pada gedung yang dipergunakan bersama.					
4	Buat kesimpulan.					
K	PROGRAM KERJA REVIU PENGGUNAAN KODE REKENI	RKA-SK				ATAS ANNYA

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR	Ket.
NO			Rencana	Realisasi	No.	Ket.
	(KLASIFIKASI YANG TIDAK TEP PADA MASYARAKAT DIANGGAR Tujuan: untuk menguji keben pengklasifikasian suatu jenis per	KAN DA naran pe	LAM BELA encantuma	NJA MODA	AL)	
1	Lakukan analisa kesesuaian pencantuman kode rekening atau jenis pendapatan/belanja didalam RKA-SKPD dengan kode rekening penganggaran dengan BAS, baik berdasarkan urusan, unit organisasi, program/kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek.					
2	Lakukan analisa sasaran dalam TOR atau KAK dengan ketepatan klarifikasi belanja/pendapatan yang tercantum dalam RKA.					
3	Buat Kesimpulan.					

Kertas Kerja Reviu RKA-SKPD

 Kertas Kerja Reviu (KKR) RKA-SKPD Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-SKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota				KKR			
Kert	as kerja Reviu		Disusun oleh/Tanggal				
			Direv	viu oleh/	Tanggal		
			Dise	tujui oleł	n/Tanggal		
	Kertas Kerja Rev	iu (k	KKR)	RKA – SK	KPD		
	Pengujian Atas Kelengkapan I	Dokı	ımen	Penduk	ung RKA - S	SKPD	
No.	Dokumen	A	.da	Tidak	Ketera	angan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5	5]	
1	KUA PAS		V				
2	RKPD		V				
3	RENSTRA – SKPD						
4	RENJA – SKPD						
5	RKA - SKPD						
	1) Program : Buah						
	2) Kegiatan : Buah						
KES	SIMPULAN / CATATAN :						
1							
2							

			• •		,Tgl-Bln-Th	n	
				Nama:			
			Nama: NIP				

- (1) Isikan No urut
- (2) Isikan dokumen perencanaan.
- (3) Beri tick mark bila ada
- (4) Beri tick mark bila tidak
- (5) Beri penjelasan atas ada/tidaknya dokumen perencanaan

Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam RKA-SKPD dengan KUA-PPAS dan RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota			R	
as kerja Reviu		Disusu	n oleh/Tanggal	
		Direviu	oleh/Tanggal	
		Disetuj	ui oleh/Tanggal	
Prioritas Dai	n Sasa	ran Pem	bangunan Daer	ah
KUA/PPAS	RK	PD	RPJMD	KET
[1]	[2	2]	[3]	[4]
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	?		?	Sesuai/tidak
dst				
		12.	Nama:	
	ngujian Atas Judul Kesesua dalam RKA-SKPD/RKA Prioritas Dar KUA/PPAS [1] Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	ngujian Atas Judul Kesesuaian Rudalam RKA-SKPD/RKA-SKPD Prioritas Dan Sasa KUA/PPAS RKI [1] [2] Program ? Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	as kerja Reviu Disusu Direviu Disetuj ngujian Atas Judul Kesesuaian Rumusan dalam RKA-SKPD/RKA-SKPD dengar Prioritas Dan Sasaran Pem KUA/PPAS RKPD [1] [2] Program ? Pengembangan Rewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dst	Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal Program Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daer KUA/PPAS RKPD RPJMD [1] [2] [3] Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dst,Tgl-Bla

- (1) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen RKA.
- (2) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen KUA/PPAS.
- (3) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen RKPD.
- (4) Berikan penjelasan kesesuaian program dalam ketiga dokumen tersebut.

3. Kertas Kerja Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota	No. KKR	
Kertas kerja Reviu	Disusun oleh/Tanggal	
Cak	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	

		I	Kesesi	iaian I	ndikator	dan T	arget l	Kinerja				
No.			Nama Program/Kegiatan/Pagu									
		gram Kegiatan		RK.	A	F	UA/P	PAS		RKP	D	KET
	Program		Vol	Sat	Jml (Rp). 000	Vol	Sat	Juml (Rp). 000	Vol	Sat	Juml (Rp). 000	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pengemb angan Kewiraus ahaan dan Keunggul an Kompetiti f Usaha Kecil Menenga h	Penyelen ggaraan pelatihan kewiraus ahaan	30	Org	75.000	3.	3-	3	?	3	?	
2.	dst											

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (4) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (5) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (6) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS.
- (7) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS.
- (8) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS.
- Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- (10) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- (11) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- (12) Uraikan kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif ketiga dokumen tersebut.

4. Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan serta Target Kinerja

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota		No. KKE	2		
Kertas kerja Reviu			Disusur	n oleh/Tanggal	
			Direviu	oleh/Tanggal	
			Disetuju	ni oleh/Tanggal	
Peng	gujian Atas Kesesuaian		Rencana rget Kine		lan Kegiatan
No	Program	Kegi	atan	Target Kinerja	Ket.
No.	(1)	(2)		(3)	(4)
1	Program Penyelengembangan pelatihan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		1	30 Org	
2	dst	Ti.			
				,Tgl-Bln-Th	n
				Nama: NIP	

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan target kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Berikan penjelasan keterkaitan kegiatan/target kinerja dalam menunjang program.

5. Kertas Kerja Kesesuaian Pencamtuman Indikator dan Target Kinerja.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu			No. KKI	R	
			Disusu	n oleh/Tanggal	
			Direviu	oleh/Tanggal	
			Disetuj	ui oleh/Tanggal	
I	Pengujian Atas Kesesu	aian Pencar	ntuman I	ndikator dan Tar	get Kinerja.
No.	Kegiatan Tolok U		52	Target Kinerja	Keterangan
	(1)	(2)		(3)	(4)
1	0.431		na kecil nen/	30 Org	Terukur/ Tidak
2	dst				
			••	,Tgl-Bln- Nama:	

- (1) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan tokok ukur kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan target Kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Beri penjelasan kesesuaian /keterukuran pencantuman indikator kinerja kegiatan.

6. Kertas Kerja Kelengkapan Dokumen Pendukung

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota				KKR			
Kerta	s kerja Reviu		Dis	usun oleh			
			Dir	eviu oleh/	Tanggal		
			Dis	etujui oleł	n/Tangga	al	
	Pengujia	n Atas Keleng	kapa	n Dokum	en Pend	ukung	
No.	Kegiatan Tolok Kin		ır	Target Kinerja	Rician Perhitungan		Keterangan
	(1)	(2)		(3)	Vol	Sat	(4)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						Ada/ tidak KAK/RAB
2	dst						
					,Tg	l-Bln-Th	n
					ma:		

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan pagu anggaran yang tercantum dalam RKA.
- (4) Berikan penjelasan kelengkapan dokumen pendukung.

7. Kertas Kerja Kesesuaian Penerapan Standar Satuan Harga Dalam Dokumen RKA-SKPD.

100000	ektorat Provinsi/	a No. 1	No. KKR			
Kert	tas kerja Reviu		Disu	sun oleh/Ta	nggal	
			Dire	viu oleh/Tan	ggal	
			Dise	tujui oleh/Ta	anggal	
Per	ngujian atas Kese	10.77	oan Stand KKA-SKPD		arga da	lam Dokumen
		На	rga Satua RKPD	n		
No.	Uraian	RKA-SK	(PD	Standar Harga		KET
		Volume	Harga Satuan	Harga Satuan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
1.	Honorarium				Sesuai	i/Tidak Sesuai
2.	dst					
				,1	rgl-Bln-1	Thn .
				Nama: NIP		

- (1) Isikan nomor urut.
- (2) Isikan jenis belanja yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan volume belanja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam RKA.
- (5) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam Standar Harga.
- (6) Berikan penjelasan (sesuai/tidak sesuai) bila terdapat perbedaan antara harga satuan [5] dengan harga satuan dalam standar [6].

Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD

P	ERAN	IGKA	T DA	ERAF	I	
 						•••

CATATAN HASIL REVIU RKA-SKPD PERANGKAT DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota(1)	Disusun oleh/Tanggal	(2)
	Diteliti oleh/Tanggal	(3)
	Disetujui oleh/Tanggal	(4)
	1	
Uraian Catatan Hasil Reviu **)		

	insi	/Ka	buj ur	dengan penuga paten/Kota ntuk melaksanak na ini kami samp	an reviu	No atas RK	mor A-SKPD	 	. tanggal	
DATA	UN	IUM	I						-	
Pagu	Ans	gar	an	TA pada perai	ngkat daer	ah	s	ebesar I	₹p	
0.00				alokasi per sumb	1700				277.0	
						Je	nis Bela	nja		
1	Kod	е		Uraian Ura Organisa Program dan	asi,	Pegawa	Barang ai dan Jasa	Modal	Jumlah	
	1	U	1	2		3	4	5	6 = 3+4+5	
1 01	-			Pendidikan						
	01			Dinas Pendidika	n					
	01	1		Program		-	1			
				Kegiatan		-	-			
1 0	101	XX.	XX	Dst						
NO.	F			TAS PROGRAM KEGIATAN	SASARA PROGRA KEGIAT	M/ O	RGANISA	SI	JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
2.	+									
3.	\vdash									
4.										
5.										
6.										
Dst.							JUML	AH		
de	nga	n Pl	PAS	rumusan rencar	na progra					

lokasi, kelompok sasaran dalam renca dengan PPAS.	ana program dan kegiatan RKA-SKPD					
•••••	lam rencana program dan kegiatan					
Kelayakan anggaran untuk menghasili	kan suatu keluaran					
4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-k	aidah penganggaran					
Kesimpulan :						
5. Kelengkapan Dokumen Pendukung						
	2 2 2 2 2 3					
6. Dst	and the control of th					
Kesimpulan :						
7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui [Berisi-hal -hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui]						
8. Rekomendasi						
	, tgl/bln/tahun (6)					
Kepala Perangkat Daerah (5) (Nama) NIP	Dalnis/Supervisor (Nama) NIP					

- *) disesuaikan dengan daerah berkenaan
- **) disesuaikan dengan jenis dokumen yang direviu

Penjelasan cara pengisian Formulir VII.1:

- 1. Adalah identitas unit organisasi APIP yang melakukan audit.
- 2. Disusun oleh:

Diisi dengan nama APIP yang bertugas menyusun Catatan Hasil Reviu.

3. Diteliti oleh:

Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk meneliti Catatan Hasil Reviu

4. Disetujui oleh:

Diisi dengan nama APIP yang memberi persetujuan Catatan Hasil Reviu.

5. Nama Organisasi Objek Reviu, serta NAMA dan NIP:

Diisi dengan nama perangkat daerah yang menjadi objek reviu, dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Kepala Perangkat Daerah.

6. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP:

Diisi dengan tanggal Catatan Hasil Reviu disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP Dalnis/Supervisor.

Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD [NAMA PERANGKAT DAERAH] TAHUN ANGGARAN [.....] NOMOR: LAP-..../20.... TANGGAL: [....../20.....]

	Daftar Isi	Halaman
I.	Ringkasan Eksekutif	[]
II.	Dasar Hukum	[]
III.	Tujuan Reviu	[]
IV.	Ruang Lingkup Reviu	[]
V.	Metodologi Reviu	[]
VI.	Gambaran Umum	[]
VII.	Uraian Hasil Reviu	
VIII.	Apresiasi	[]
T	*	

Lampiran:

Catatan Hasil Reviu (CHR)

LAPORAN HASIL REVIU RKA-SKPD (PERANGKAT DAERAH) [NAMA PERANGKAT DAERAH] TAHUN ANGGARAN [....]

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]

- Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, denganberpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementarayang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] melakukan reviu RKA-SKPD [Nama Perangkat Daerah] Tahun Anggaran [....]. Adapun reviu dilaksanakan pada saat: 1) penyusunan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah setelah ditetapkannya KUA/PPAS (bulan Juni/Juli).

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) [....];
- 2) [....];
- 3) [....].
- 4) dst.

Dari hasil reviu tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-SKPD] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu].

[nama unit penyusun RKA-SKPD] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu].

II. DASAR HUKUM

Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-SKPD)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan setiap tahun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tanggal Tahun ... tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

III. TUJUAN REVIU

[Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-SKPD]

IV. RUANG LINGKUP REVIU

[Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-SKPD]

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

[Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA-SKPD dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-SKPD]

- Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerahserta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD TA

 Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota....] Nomor tanggal, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	[]	NIP []
Dalnis/Supervisor	;	[]	NIP []
Ketua Tim	:	[]	NIP []
Anggota Tim	:	1. []	NIP []
		2. []	NIP []
		3. []	NIP []

Reviu RKA-SKPD TA [....] dilaksanakan mulai tanggal [....] s.d. [....]

VI. GAMBARAN UMUM

[Berisi proses penyusunan RKA-SKPD dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta nama program-program perangkat daerah dan jumlah pagu anggarannya]

- 1. [Berisi Proses Penyusunan RKA-SKPD]
- [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan Pagu Anggaran Perangkat Daerah]
- 3. Program RKA-SKPD [Nama Perangkat Daerah], yaitu:

No.	Program	Jumlah Rupiah Pagu Anggaran
1.		
dst		3.663

VII. URAIAN HASIL REVIU

[Berisi uraian hasil reviu RKA-SKPD]

- 1) [....];
- 2) [....];
- 3) [....].
- 4) dst.

VIII. APRESIASI

[Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-SKPD [Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [.....] atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran [.....].

....., [Tanggal/Bulan/Tahun] [Inspektur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]

> (Nama) NIP.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a. Definisi

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Tujuan

- 1) Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketetuan yang berlaku;
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 3) Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.

c. Yang Diperiksa

- 1) Keandalan dan keabsahan realisasi penyerapan dana ditunjukkan dengan kesesuaian antara jumlah DAK Fisik yang telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), jumlah DAK Fisik yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga, dan sisa dana di RKUD dengan data penyerapan dana yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.
- 2) Keadaan dan keabsahan realisasi capaian keluaran (output) kegiatan ditunjukkan dengan kesesuaian antara jenis dan jumlah capaian konstruksi, jumlah unit barang, dan/atau progress pekerjaan dengan data capaian keluaran (output) yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.

d. Tahapan

- 1) Perencanaan, terdiri dari:
 - i. Pembentukan tim;
 - ii. Penyusunan jadwal;
 - iii. Pengumpulan data dan informasi
- 2) Pelaksanaan, terdiri dari:
 - i. Penelaahan kesesuaian data;
 - ii. Identifikasi permasalahan;
 - iii. Permintaan klarifikasi kepada OPD pelaksana DAK Fisik;
 - iv. Penyusunan rekapitulasi proses reviu; dan
 - v. Perbaikan data dalam dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik oleh OPD pelaksana DAK Fisik

- 3) Pelaporan, terdiri dari:
 - i. Penyusunan draf Catatan Hasil Reviu (CHR);
 - ii. Penyampaian draf Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada OPD pelaksana DAK Fisik;
 - iii. Konfirmasi atas draf Catatan Hasil Reviu (CHR) oleh OPD pelaksana DAK Fisik; dan
 - iv. Penyampaian hasil reviu Inspektorat Daerah kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada kepala OPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan kepala OPD pelaksana DAK Fisik
 - v. Penginputan hasil reviu ke dalam aplikasi OMSPAN, paling lambat sesuai batas waktu penyampaian syarat penyaluran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

e. Format

Program Kerja Reviu DAK Fisik

Untuk keseragaman pelaksanaan Reviu dan agar tujuan Reviu tercapai, berikut ini adalah program kerja Reviu:

- 1. Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik yang disalurkan sekaligus dalam hal pagu per bidang sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - a. Tujuan Reviu: untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan.

b. Langkah Reviu:

- 1) Dapatkan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya per jenis per bidang/subbidang dari OPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Lakukan Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana DAK Fisik tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a) Perhatikan realisasi penyerapan per bidang/subbidang yang tercantum dalam laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan tersebut.
- b) Telusuri jumlah tersebut ke daftar SP2D, apakah jumlahnya tepat sama dengan daftar SP2D masing-masing subbidang/bidang.
- c) Dapatkan dokumen SP2D yang tercantum dalam daftar SP2D, periksa dasar penerbitan SP2D tersebut (misal: Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan, PHO, FHO, Laporan Konsultan Pengawas, Laporan dari Fasilitator, SPJ untuk kegiatan nonfisik (rapat, biaya lelang, biaya perjalanan dinas, honorarium fasilitator swakelola).
- d) Lakukan pencocokan SP2D ke masing-masing kontrak/SPK/swakelola atau kegiatan penunjang yang dibayar dengan menggunakan SP2D tersebut.
- e) Jumlahkan total nilai SP2D pada huruf d) dan hitung persentasenya dari jumlah yang disalurkan (jumlah SP2D/jumlah kumulatif salur x 100%).
- 3) Buat simpulan atas Reviu laporan realisasi penyerapan dana untuk memastikan apakah SP2D tersebut valid, tepat jumlah, dan didukung dasar pembayaran yang sah.
- 4) Lakukan Reviu atas laporan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Fisik yang kontraktual
 - (1) Dapatkan daftar kontrak/SPK/swakelola yang dilaporkan dan di-input dalam Aplikasi OMSPAN per 21 Juli di tahun sebelumnya pada masing-masing bidang/subbidang.
 - (2) Dapatkan dokumen kontraknya, kemudian teliti time line (alur waktu).
 - (a) Pengadaan dengan sistem pelelangan/tender
 - ✓ Urutkan tanggal mulai pengumuman pemenang sampai dengan penandatangan kontrak untuk memastikan kontrak tersebut sah dan telah melalui proses pelelangan/tender yang telah selesai paling lambat tanggal 21 Juli tahun berjalan.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - (b) Pengadaan dengan sistem e-purchasing
 - ✓ Urutkan mulai tanggal penawaran e-purchasing sampai dengan tanggal penandatangan kontrak e-purchasing,

- untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
- ✓ Pastikan nilai kontrak e-purchasing yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (c) Pengadaan dengan sistem swakelola
 - ✓ Urutkan mulai tanggal penetapan penyelenggara swakelola sampai dengan tanggal penandatangan kontrak swakelola, untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak swakelola yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (3) Lakukan pencocokan realisasi pembayaran atas kontrak/SPK/ Swakelola tersebut dengan dokumen SP2D.
- (4) Dapatkan dokumen kemajuan penyelesaian fisik per masingmasing kontrak/SPK/swakelola (dengan meminta dokumen pendukung yang menyatakan progres fisik terakhir misal laporan konsultan pengawas, laporan fasilitator untuk swakelola, PHO, FHO).
- (5) Tuangkan dalam kertas kerja manual perhitungan capaian keluaran (output) kegiatan.
- (6) Buat simpulan capaian keluaran (output) kegiatan hasil Reviu.
- b) Kegiatan penunjang (jika ada) diperhitungkan dalam mengukur capaian keluaran (output) kegiatan.
- c. Untuk memastikan keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik, dilakukan pengecekan terhadap:
 - 1) kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan daftar kontrak kegiatan yang telah diinput aplikasi OMSPAN.
 - b) Dapatkan dokumen kontraknya, teliti kesesuaian dengan daftar kontrak kegiatan di dalam Aplikasi OMSPAN.
 - (1) Teliti kesesuaian jenis, bidang, subbidang, menu kegiatan, rincian kegiatan, dan detil rincian kegiatan dengan daftar Rencana Kegiatan yang telah di-upload dalam Aplikasi OMSPAN.
 - (2) Teliti kesesuaian nomor, judul, dan pelaksana kegiatan kontrak dengan daftar kontrak kegiatan dalam Aplikasi OMSPAN.

- (3) Teliti tanggal kontrak, pastikan kontrak ditandatangani paling lambat tanggal 21 Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Teliti volume output kontrak, pastikan volume output tidak melebihi output Rencana Kegiatan.
- (5) Teliti kesesuaian satuan output kontrak, pastikan satuan output yang digunakan sama dengan satuan output dalam Rencana Kegiatan.
- (6) Teliti tanggal awal dan akhir pelaksanaan kegiatan kontrak, pastikan tanggal tersebut sama dengan daftar kontrak dalam Aplikasi OMSPAN.
- (7) Pastikan nilai kontrak kegiatan sama dengan nilai yang diinput pada Aplikasi OMSPAN.
- 2) kesesuaian antara jumlah sisa DAK Fisik pada RKUD dan SP2D BUD atas penggunaan sisa DAK Fisik dengan data sisa dan penggunaan sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan dokumen SP2D BUN tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan nilai penyaluran DAK Fisik.
 - b) Dapatkan dokumen SP2D BUD tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan nilai penyerapan DAK Fisik.
 - c) Selisihkan jumlah penyaluran dan penyerapan DAK Fisik tahuntahun sebelumnya.
 - d) Dapatkan informasi jumlah sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya di RKUD.
 - e) Cek kesesuaian jumlah sisa DAK Fisik pada RKUD dengan jumlah sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN.
 - f) Dapatkan dokumen SP2D BUD penggunaan sisa DAK Fisik tahuntahun sebelumnya di RKUD.
 - g) Cek kesesuaian data penggunaan sisa DAK Fisik.
 - (1) Penggunaan sisa dana pada bidang.
 - (2) Rincian kegiatan yang menggunakan sisa DAK Fisik.
 - (3) Volume dan satuan output kegiatan yang menggunakan sisa DAK Fisik.
 - (4) Nomor, tanggal, dan nilai SP2D BUD penggunaan sisa DAK Fisik.
- 3) Untuk penyaluran tahap I, kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK Fisik dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan data kontrak kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya.
 - b) Dapatkan data foto dengan titik koordinat realisasi kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya pada Aplikasi OMSPAN.

- c) Pastikan terdapat foto dengan titik koordinat realisasi kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya (t-1) untuk setiap kontrak kegiatan yang telah ada penyerapan atau SP2D-nya.
- d) Pastikan titik koordinat pada foto dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan lokasi yang seharusnya.

Dalam melakukan pengecekan kesesuaian data titik koordinat pada foto realisasi kegiatan DAK Fisik, tidak perlu dilakukan di lokasi kegiatan. Pengecekan titik koordinat dapat dilakukan melalui aplikasi penyedia data titik koordinat melalui perangkat komputer di ruang kerja yang terhubung dengan jaringan internet.

Apabila masih terdapat ketidaksesuaian data kontrak kegiatan, jumlah sisa DAK Fisik, dan titik koordinat pada foto realisasi kegiatan DAK Fisik, konfirmasi dengan OPD pelaksana Keuangan Daerah dan OPD teknis untuk dilakukan klarifikasi kesesuaian data.

Dalam hal tahun sebelumnya daerah tidak mendapatkan DAK Fisik bidang/subbidang tertentu, Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya tidak dilakukan.

- 2. Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Tahap I sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap
 - a. Tujuan Reviu: untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahap I dengan ketentuan.
 - b. Langkah Reviu:
 - 1) Dapatkan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Tahap I per jenis per bidang/subbidang.
 - 2) Dapatkan daftar SP2D masing-masing bidang/subbidang yang merupakan lampiran laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Tahap I.
 - 3) Lakukan Reviu atas realisasi penyerapan sebagai berikut:
 - a) Perhatikan jumlah salur DAK Fisik Tahap I.
 - b) Perhatikan realisasi penyerapan per bidang/subbidang tahap I yang tercantum dalam laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan tersebut.
 - c) Telusuri jumlah tersebut ke daftar SP2D per bidang/subbidang, apakah jumlahnya tepat sama dengan daftar SP2D masing-masing bidang/subbidang.
 - d) Mintakan daftar kontrak/SPK/swakelola yang ditandatangani pada periode antara tanggal salur DAK Fisik Tahap I sampai

- dengan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan.
- e) Dapatkan dokumen SP2D yang tercantum dalam daftar SP2D, periksa dasar penerbitan SP2D tersebut (misal: Laporan Konsultan Pengawas, Laporan dari Fasilitator, SPJ untuk kegiatan nonfisik (rapat, biaya lelang, biaya perjalanan dinas, honorarium fasilitator swakelola).
- f) Petakan SP2D ke masing-masing kontrak/SPK/swakelola atau kegiatan penunjang yang dibayar dengan mengunakan SP2D tersebut.
- g) Perhatikan tanggal SP2D, pastikan tanggal SP2D terbit pada periode antara tanggal salur DAK Fisik Tahap I sampai dengan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan tahap I.
- h) Jika terdapat SP2D terbit mendahului penyaluran DAK Tahap I, teliti dasar penerbitan SP2D dan penggunaannya.
- i) Jika jumlah SP2D melebihi jumlah distribusi SP2D BUN per subbidang, catat dan identifikasi penyebabnya.
- j) Tuangkan dalam kertas kerja Reviu, buat simpulan apakah SP2D tersebut valid, tepat jumlah, dan didukung dasar pembayaran yang sah.
- k) Jumlahkan total nilai SP2D huruf j) dan hitung persentasenya dari jumlah yang disalurkan (jumlah SP2D per bidang/jumlah kumulatif salur DAK Fisik per bidang x 100%).
- l) Dalam hal terdapat SP2D BUD yang berasal dari dana talangan APBD yang digunakan dengan tujuan manajemen kas dalam penyelesaian output DAK Fisik, maka dalam laporan hasil reviu agar dicantumkan terpisah dari dana yang bersumber dari DAK Fisik dan cukup dicantumkan sebagai tambahan informasi dalam dokumen laporan hasil reviu.
- m)Buat simpulan apakah persentase (%) penyerapan dana telah mencapai ≥75% dari DAK Fisik yang telah diterima di RKUD dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) Lakukan Reviu capaian keluaran (output) sebagai berikut:
 - a) Kegiatan fisik yang kontraktual
 - (1) Dapatkan daftar kontrak/SPK/swakelola yang dilaporkan dan diinput dalam Aplikasi OMSPAN per 21 Juli masing-masing bidang/subbidang.
 - (2) Dapatkan dokumen kontraknya, kemudian teliti time line (alur waktu).
 - (a) Pengadaan dengan sistem pelelangan/tender

- ✓ Urutkan tanggal mulai pengumuman pemenang sampai dengan penandatangan kontrak untuk memastikan kontrak tersebut sah dan telah melalui proses pelelangan/tender yang telah selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
- ✓ Pastikan nilai kontrak yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (b) Pengadaan dengan sistem e-purchasing
 - Urutkan mulai tanggal penawaran e-purchasing sampai dengan tanggal penandatangan kontrak e-purchasing, untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak e-purchasing yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (c) Pengadaan dengan sistem swakelola
 - ✓ Urutkan mulai tanggal penetapan penyelenggara swakelola sampai dengan tanggal penandatangan kontrak swakelola, untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak swakelola yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (3) Petakan realisasi pembayaran atas kontrak/SPK/swakelola tersebut (korelasikan dengan langkah Reviu SP2D).
- (4) Dapatkan progres penyelesaian fisik per masing-masing kontrak/SPK/swakelola dengan meminta dokumen pendukung yang menyatakan progres fisik terakhir (misal: laporan konsultan pengawas, laporan fasilitator untuk swakelola, PHO, FHO).
- (5) Tuangkan dalam kertas kerja manual perhitungan capaian keluaran (output).
- (6) Perhitungan capaian keluaran (output) menggunakan data kontrak yang telah terdapat SP2D BUD secara proporsional.
- (7) Pastikan volume realisasi capaian keluaran (output) pada Aplikasi OMSPAN tidak melebihi volume capaian keluaran (output) dalam kontrak.
- (8) Buat simpulan persentase (%) capaian keluaran (output) hasil Reviu.

- b) Kegiatan penunjang (jika ada) diperhitungkan dalam mengukur capaian keluaran (output) kegiatan.
- c. Untuk memastikan keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik, dilakukan pengecekan terhadap:
 - 1) kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan daftar kontrak kegiatan yang telah diinput Aplikasi OMSPAN.
 - b) Dapatkan dokumen kontraknya, teliti kesesuaian dengan daftar kontrak kegiatan di dalam Aplikasi OMSPAN.
 - (1) Teliti kesesuaian jenis, bidang, subbidang, menu kegiatan, rincian kegiatan, dan detil rincian kegiatan dengan daftar Rencana Kegiatan yang telah di-upload dalam Aplikasi OMSPAN.
 - (2) Teliti kesesuaian nomor, judul, dan pelaksana kegiatan kontrak dengan daftar kontrak kegiatan dalam Aplikasi OMSPAN.
 - (3) Teliti tanggal kontrak, pastikan kontrak ditandatangani paling lambat tanggal 21 Juli tahun anggaran berjalan.
 - (4) Teliti volume output kontrak, pastikan volume output tidak melebihi output Rencana Kegiatan.
 - (5) Teliti kesesuaian satuan output kontrak, pastikan satuan output yang digunakan sama dengan satuan output dalam Rencana Kegiatan.
 - (6) Teliti tanggal awal dan akhir pelaksanaan kegiatan kontrak, pastikan tanggal tersebut sama dengan daftar kontrak dalam Aplikasi OMSPAN.
 - (7) Pastikan nilai kontrak kegiatan sama dengan nilai yang diinput pada Aplikasi OMSPAN.
 - 2) kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK Fisik dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan data kontrak kegiatan DAK Fisik tahun berjalan.
 - b) Dapatkan data foto dengan titik koordinat realisasi kegiatan DAK Fisik tahap I pada Aplikasi OMSPAN.
 - c) Pastikan terdapat foto dengan titik koordinat realisasi kegiatan DAK Fisik untuk setiap kontrak kegiatan yang telah ada penyerapan atau SP2D-nya.
 - d) Pastikan titik koordinat pada foto dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan lokasi yang seharusnya.

Dalam melakukan pengecekan kesesuaian data titik koordinat pada foto realisasi kegiatan DAK Fisik, tidak perlu dilakukan di lokasi kegiatan. Pengecekan titik koordinat dapat dilakukan melalui aplikasi penyedia data titik koordinat melalui perangkat komputer di ruang kerja yang terhubung dengan jaringan internet.

Apabila masih terdapat ketidaksesuaian data kontrak kegiatan dan titik koordinat pada foto realisasi kegiatan DAK Fisik, konfirmasi dengan OPD pelaksana Keuangan Daerah dan OPD teknis untuk dilakukan klarifikasi kesesuaian data.

- 3. Reviu atas Laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Tahap II sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III
 - a. Tujuan Reviu: untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahap II dengan ketentuan.

b. Langkah Reviu:

- 1) Dapatkan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Tahap II per jenis per bidang/subbidang.
- 2) Dapatkan daftar SP2D masing-masing bidang/subbidang yang merupakan lampiran laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Tahap II.
- 3) Lakukan Reviu atas realisasi penyerapan sebagai berikut:
 - a) Perhatikan jumlah salur DAK Fisik sampai dengan Tahap II.
 - b) Perhatikan realisasi penyerapan per bidang/subbidang sampai dengan Tahap II yang tercantum dalam laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan tersebut.
 - c) Telusuri jumlah tersebut ke daftar SP2D per bidang/subbidang, apakah jumlahnya tepat sama dengan daftar SP2D masing-masing bidang/subbidang.
 - d) Dapatkan dokumen SP2D yang tercantum dalam daftar SP2D, periksa dasar penerbitan SP2D tersebut (misal: Laporan Konsultan Pengawas, Laporan dari Fasilitator, SPJ untuk kegiatan nonfisik (rapat, biaya lelang, biaya perjalanan dinas, honorarium fasilitator swakelola).
 - e) Petakan SP2D ke masing-masing kontrak/SPK/swakelola atau kegiatan penunjang yang dibayar dengan mengunakan SP2D tersebut.
 - f) Perhatikan tanggal SP2D, pastikan tanggal SP2D terbit pada periode antara tanggal salur DAK Fisik Tahap I sampai dengan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan Tahap II.

- g) Jika jumlah SP2D melebihi jumlah distribusi SP2D BUN per subbidang, catat dan identifikasi penyebabnya.
- h) Tuangkan dalam kertas kerja Reviu, buat simpulan apakah SP2D tersebut valid, tepat jumlah, dan didukung dasar pembayaran yang sah.
- i) Jumlahkan total nilai SP2D huruf h) dan hitung persentasenya dari jumlah yang disalurkan (jumlah SP2D per bidang/jumlah kumulatif salur DAK Fisik per bidang/subbidang x 100%).
- j) Dalam hal terdapat SP2D BUD yang berasal dari dana talangan APBD yang digunakan dengan tujuan manajemen kas dalam penyelesaian output DAK Fisik, maka dalam laporan hasil reviu agar dicantumkan terpisah dari dana yang bersumber dari DAK Fisik dan cukup dicantumkan sebagai tambahan informasi dalam dokumen laporan hasil reviu.
- k) Buat simpulan apakah persentase (%) penyerapan dana telah mencapai ≥90% dari DAK yang telah diterima di RKUD dan tuangkan dalam kertas kerja.
- 4) Lakukan Reviu capaian keluaran (output) sebagai berikut:
 - a) Kegiatan fisik yang kontraktual
 - (1) Dapatkan daftar kontrak/SPK/swakelola yang dilaporkan dan diinput dalam Aplikasi OMSPAN per 21 Juli masing-masing bidang/subbidang.
 - (2) Dapatkan dokumen kontraknya, kemudian teliti time line (alur waktu).
 - (a) Kontraktual dengan pelelangan/tender
 - ✓ Urutkan tanggal mulai pengumuman pemenang sampai dengan penandatangan kontrak untuk memastikan kontrak tersebut sah dan telah melalui proses pelelangan/tender yang telah selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - (b) Kontraktual dengan e-purchasing
 - ✓ Urutkan mulai tanggal penawaran e-purchasing sampai dengan tanggal penandatangan kontrak e-purchasing, untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak e-purchasing yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.

- (c) Pengadaan dengan sistem swakelola
 - ✓ Urutkan mulai tanggal penetapan penyelenggara swakelola sampai dengan tanggal penandatangan kontrak swakelola, untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak swakelola yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (3) Petakan realisasi pembayaran atas kontrak/SPK/swakelola tersebut (korelasikan dengan langkah Reviu SP2D).
- (4) Dapatkan progres penyelesaian fisik per masing-masing kontrak/SPK/swakelola dengan meminta dokumen pendukung yang menyatakan progres fisik terakhir (misal: laporan konsultan pengawas, laporan fasilitator untuk swakelola, PHO, FHO).
- (5) Tuangkan dalam kertas kerja manual perhitungan capaian keluaran (output).
- (6) Perhitungan capaian keluaran (output) menggunakan data kontrak yang telah terdapat SP2D BUD secara proporsional.
- (7) Pastikan volume realisasi capaian keluaran (output) dalam Aplikasi OMSPAN tidak melebihi volume capaian keluaran (output) dalam kontrak.
- (8) Buat simpulan persentase (%) capaian keluaran (output) hasil Reviu apakah telah mencapai ≥70%.
- b) Kegiatan penunjang (jika ada) diperhitungkan dalam mengukur capaian keluaran (output).
- c. Untuk memastikan keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik, dilakukan pengecekan terhadap:
 - 1) kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK Fisik dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan daftar kontrak kegiatan DAK Fisik.
 - b) Dapatkan data foto dengan titik koordinat realiasasi kegiatan DAK Fisik tahap II pada Aplikasi OMSPAN.
 - c) Pastikan terdapat foto dengan titik koordinat realisasi kegiatan DAK Fisik tahap II untuk setiap kontrak kegiatan yang telah ada penyerapan atau SP2D-nya.
 - d) Pastikan titik koordinat pada foto dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan lokasi yang seharusnya.

Dalam melakukan pengecekan kesesuaian data titik koordinat pada foto realisasi kegiatan DAK Fisik, tidak perlu dilakukan di lokasi

- kegiatan. Pengecekan titik koordinat dapat dilakukan melalui aplikasi penyedia data titik koordinat melalui perangkat komputer di ruang kerja yang terhubung dengan jaringan internet.
- 2) kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan kepada penyedia barang/jasa dan/atau pelaksana kegiatan untuk mencapai keluaran (output) 100% kegiatan DAK Fisik dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan data kontrak yang akan dilaksanakan hingga penyelesaian kegiatan dengan capaian keluaran (output) 100%.
 - b) Identifikasi kontrak kegiatan yang mengalami addendum.
 - c) Untuk nilai kontrak yang tidak terdapat addendum dan/atau addendum dengan nilai naik, maka nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan otomatis sebesar nilai kontrak awal.
 - d) Untuk nilai kontrak yang terdapat addendum turun, maka nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sesuai dengan nilai addendum turun kontrak tersebut.
 - e) Untuk nilai kontrak yang statusnya batal/kegiatan tidak dilaksanakan, maka nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatannya nol.
 - f) Jumlahkan seluruh nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan tersebut.
 - g) Contoh perhitungan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian keluaran (output) 100% terlampir.

Apabila masih terdapat ketidaksesuaian titik koordinat pada foto realisasi kegiatan DAK Fisik dan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan, konfirmasi dengan OPD pelaksana Keuangan Daerah dan OPD teknis untuk dilakukan klarifikasi kesesuaian data.

- 4. Reviu atas Laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik yang sebagian atau seluruh kegiatan DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap (penyaluran sekaligus rekomendasi kementerian/lembaga)
 - a. Tujuan Reviu : untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan.

b. Langkah Reviu:

1) Dapatkan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya per jenis per

- bidang/subbidang dari OPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Dapatkan daftar SP2D masing-masing bidang/subbidang yang merupakan lampiran laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Lakukan Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - a) Perhatikan realisasi penyerapan per bidang/subbidang yang tercantum dalam laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan tersebut.
 - b) Telusuri jumlah tersebut ke daftar SP2D, apakah jumlahnya tepat sama dengan daftar SP2D masing-masing subbidang/bidang.
 - c) Dapatkan dokumen SP2D yang tercantum dalam daftar SP2D, periksa dasar penerbitan SP2D tersebut (misal: BA serah terima, Provision Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO), Laporan Konsultan Pengawas, Laporan dari Fasilitator, SPJ untuk kegiatan nonfisik (rapat, biaya lelang, biaya perjalanan dinas, honorarium fasilitator swakelola).
 - d) Lakukan SP2D pencocokan ke masing-masing kontrak/SPK/swakelola atau kegiatan penunjang yang dibayar dengan menggunakan SP2D tersebut.
 - e) Jumlahkan total nilai SP2D huruf d) dan hitung persentasenya dari jumlah yang disalurkan (jumlah SP2D/Jumlah kumulatif salur x 100%).
- 4) Buat simpulan atas Reviu laporan realisasi penyerapan dana, untuk memastikan apakah SP2D tersebut valid, tepat jumlah, dan didukung dasar pembayaran yang sah.
- 5) Lakukan Reviu atas laporan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Fisik yang kontraktual
 - (1) Dapatkan daftar kontrak/SPK/swakelola yang dilaporkan dan di-input dalam Aplikasi OMSPAN per 21 Juli di tahun sebelumnya pada masing-masing bidang/subbidang.
 - (2) Dapatkan dokumen kontraknya, kemudian teliti time line (alur waktu).
 - (a) Pengadaan dengan sistem pelelangan/tender
 - √ Urutkan tanggal mulai pengumuman pemenang sampai dengan penandatangan kontrak untuk memastikan kontrak tersebut sah dan telah melalui proses

- pelelangan/tender yang telah selesai paling lambat tanggal 21 Juli tahun berjalan.
- ✓ Pastikan nilai kontrak yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (b) Pengadaan dengan sistem e-purchasing
 - ✓ Urutkan mulai tanggal penawaran e-purchasing sampai dengan tanggal penandatangan kontrak e-purchasing, untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak e-purchasing yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (c) Pengadaan dengan sistem swakelola
 - ✓ Urutkan mulai tanggal penetapan penyelenggara swakelola sampai dengan tanggal penandatangan kontrak swakelola, untuk memastikan kontrak tersebut sah dan prosesnya selesai paling lambat tanggal 21 Juli.
 - ✓ Pastikan nilai kontrak swakelola yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- (3) Lakukan pencocokan realisasi pembayaran atas kontrak/SPK/ Swakelola tersebut dengan dokumen SP2D.
- (4) Dapatkan dokumen kemajuan penyelesaian fisik per masingmasing kontrak/SPK/swakelola (dengan meminta dokumen pendukung yang menyatakan progres fisik terakhir misal laporan konsultan pengawas, laporan fasilitator untuk swakelola, PHO, FHO).
- (5) Tuangkan dalam kertas kerja manual perhitungan capaian keluaran (output) kegiatan.
- (6) Buat simpulan capaian keluaran (output) kegiatan hasil Reviu.
- b) Kegiatan penunjang (jika ada) diperhitungkan dalam mengukur capaian keluaran (output) kegiatan.
- c. Untuk memastikan keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik, dilakukan pengecekan terhadap:
 - 1) kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan daftar kontrak kegiatan yang telah diinput Aplikasi OMSPAN.

- b) Dapatkan dokumen kontraknya, teliti kesesuaian dengan daftar kontrak kegiatan di dalam Aplikasi OMSPAN.
- c) Teliti kesesuaian jenis, bidang, subbidang, menu kegiatan, rincian kegiatan, dan detil rincian kegiatan dengan daftar Rencana Kegiatan yang telah di-upload dalam Aplikasi OMSPAN.
- d) Teliti kesesuaian nomor, judul, dan pelaksana kegiatan kontrak dengan daftar kontrak kegiatan dalam Aplikasi OMSPAN.
- e) Teliti tanggal kontrak, pastikan kontrak ditandatangani paling lambat tanggal 21 Juli tahun anggaran berjalan.
- f) Teliti volume capaian keluaran (output) kontrak, pastikan volume capaian keluaran (output) tidak melebihi capaian keluaran (output) Rencana Kegiatan.
- g) Teliti kesesuaian satuan capaian keluaran (output) kontrak, pastikan satuan capaian keluaran (output) yang digunakan sama dengan satuan capaian keluaran (output) dalam Rencana Kegiatan.
- h) Teliti tanggal awal dan akhir pelaksanaan kegiatan kontrak, pastikan tanggal tersebut sama dengan daftar kontrak dalam Aplikasi OMSPAN.
- i) Pastikan nilai kontrak kegiatan sama dengan nilai yang diinput pada Aplikasi OMSPAN.
- kesesuaian antara jumlah sisa DAK Fisik pada RKUD dan SP2D BUD atas penggunaan sisa DAK Fisik dengan data sisa dan penggunaan sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.
 - a) Dapatkan dokumen SP2D BUN tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan nilai penyaluran DAK Fisik.
 - b) Dapatkan dokumen SP2D BUD tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan nilai penyerapan DAK Fisik.
 - c) Selisihkan jumlah penyaluran dan penyerapan DAK Fisik tahuntahun sebelumnya.
 - d) Dapatkan informasi jumlah sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya di RKUD.
 - e) Cek kesesuaian jumlah sisa DAK Fisik pada RKUD dengan jumlah sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN.
 - f) Dapatkan dokumen SP2D BUD penggunaan sisa DAK Fisik tahuntahun sebelumnya di RKUD.
 - g) Cek kesesuaian data penggunaan sisa DAK Fisik.
 - Penggunaan sisa dana pada bidang.
 - (2) Rincian kegiatan yang menggunakan sisa DAK Fisik.
 - (3) Volume dan satuan output kegiatan yang menggunakan sisa DAK Fisik.

- (4) Nomor, tanggal, dan nilai SP2D BUD penggunaan sisa DAK Fisik.
- 3) kesesuaian antara dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan kegiatan DAK Fisik dengan data capaian keluaran (output) dan data input Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN
 - a) Dapatkan data Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan dari Aplikasi OMSPAN.
 - b) Dapatkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan dari OPD pelaksana DAK Fisik.
 - c) Bandingkan data OMSPAN dengan dokumen, pastikan nomor, tanggal, dan nilai Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan sama.
 - d) Cek data capaian output pada laporan output dalam aplikasi OMSPAN.
 - e) Cek kesesuaian data volume, satuan, dan persentase progres fisik realisasi capaian output dalam aplikasi OMSPAN dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan.
 - f) Pengecekan dilakukan terhadap dokumen Berita Acara Serah Terima dengan data yang diinput pada Aplikasi OMSPAN.

Apabila masih terdapat ketidaksesuaian data kontrak kegiatan, titik koordinat pada foto realisasi kegiatan DAK Fisik, dan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan, Pereviu melakukan konfirmasi kepada OPD pelaksana DAK Fisik untuk dilakukan penyesuaian data.

Pelaksanaan program kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu sesuai dengan format III.

Kertas Kerja Reviu DAK Fisik

CHECK LIST DOKUMEN REVIU REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT TAHUN BIDANG

NO	DOKUMEN YANG DIREVIU	KEBERADAAN		KESESUAIAN DENGAN OMSPAN		VETEDANO AN	
73,50		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN	
Α	LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA						
1	Daftar SP2D	√				(diisi jika dokumer	
2	Dokumen SP2D a. SP2D Kontraktual	7				tidak ada dan atau tidak sesuai)	
	b. SP2D Kegiatan Penunjang	√				naur sesauy	
3	% Penyerapan Dana						
4	Simpulan Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana						
В	CAPAIAN OUTPUT						
1	Daftar Kontrak						
2	Dokumen Kontrak						
	a. Tgl Pelelangan b. Tanggal Kontrak						
	c. Nilai Kontrak						
	d. Jangka waktu kontrak						
	e. Nama Rekanan						
3	BA Serah Terima						
5	PHO/FHO Laporan Konsultan						
_	Pengawas						
6	Kesesuaian satuan output kontrak dengan output dalam RK						
7	Capaian output			,			
8	Simpulan Hasil Reviu Capaian Output		,				
	Simpulan						

Catatan Hasil Reviu DAK Fisik

KOP INSPEKTORAT DAERAH

CATATAN HASIL REVIU

ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAK FISIK ... [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang [sebutkan nama bidang/subbidang yang direviu] Tahap ... [I/II] Tahun ... / Tahun sebelumnya (Tahun ...)

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur tanggal2020, kami telah melaksanakan Reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler/Penugasan/Afirmasi*) Bidang/SubbidangTahap I/II Tahun/ Tahun sebelumnya (tahun ...)**, dengan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

1. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu adalah untuk:

- 1. membantu Pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;
- memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.
- 2. Ruang Lingkup Ruang lingkup Reviu meliputi Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler/Penugasan/Afirmasi*) Bidang/SubbidangTahap I/II Tahun/ Tahun sebelumnya (tahun ...)** Reviu dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal
- 3. Objek Reviu

[Sebutkan DAK Fisik jenis/bidang/subbidang dan tahapan yang direviu]

4. Hasil Reviu

Realisasi transfer DAK Fisik Reguler/Penugasan/Afirmasi*) Bidang/SubbidangTahap I/II Tahun/ Tahun sebelumnya (tahun ...)** dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah [nama daerah] sampai dengan Reviu tanggal 2020 sebesar Rp...... atau% dari pagu alokasi.

Realisasi	penyerapan	DAK	Fisik	Reguler/Penugasan/Afirmas
Reguler/Per	asi penyerapan DAK Fisik Reguler/Penugasan/A r/Penugasan/Afirmasi*) Bidang/SubbidangTahap I/II Tahu sebelumnya (tahun)** menurut hasil Reviu sebesar Rp dari dana yang telah diterima di RKUD, sedangkan menurut OPD satau% dari dana yang telah diterima di RKUD.	Tahap I/II Tahun/		
Tahun sebe	elumnya (tahun)	* menu	ırut hasil Re	viu sebesar Rp atau
% dari d	lana yang telah dite	rima di	i RKUD, seda	angkan menurut OPD sebesar
Rp atau	% dari dana yar	g telah	diterima di F	RKUD.

Capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler/Penugasan/Afirmasi*) Bidang/SubbidangTahap I/II Tahun/ Tahun sebelumnya (tahun ...)** adalah....%

Catatan untuk ditindaklanjuti

[Jelaskan hal-hal yang ditemukan dalam proses Reviu yang perlu ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, serta tindak lanjut yang telah dilakukan]

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan untuk DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang [sebutkan nama bidang/subbidang yang diReviu] Tahap [I/II] tahun ... / tahun sebelumnya (tahun ...). Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi Bidang/Subbidang sebutkan nama bidang/subbidang yang diReviu], dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- 1. Realisasi penyerapan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang [sebutkan nama bidang/bidang yang diReviu] menurut hasil Reviu sebesar Rp atau ...% dari dana yang telah diterima di RKUD:
- keluaran Capaian (output) kegiatan Fisik DAK Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang [sebutkan nama bidang/subbidang yang diReviu] menurut hasil Reviu sebesar ... %.

0,	
Tanggung jawab kami terbatas pada hasil	Reviu berdasarkan atas data/dokumen
yang disampaikan oleh Dinas/Badan	[dinas yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan DAK Fisik tertentu].	
	Inspektur
	Provinsi/Kabupaten/Walikota,
	NIP

Surat Penyampaian Hasil Reviu

KOP INSPEKTORAT DAERAH

Nomor [lokasi], [tanggal]

Lampiran

Perihal

: Penyampaian Hasil Reviu Laporan Realisasi

Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) DAK Fisik

[Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang [sebutkan nama bidang/subbidang yang direviu] Tahap [I/II] tahun ... / tahun

sebelumnya (tahun ...).

Kepada Yth.:

Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Lokasi)

Di Tempat

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, kami telah melakukan Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan untuk DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang sebutkan nama bidang/subbidang yang direviu] Tahap [I/II] tahun ... /tahun sebelumnya (tahun ...). Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan, dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang sebutkan nama bidang/subbidang yang direviu].

Adapun pokok-pokok hasil Reviu adalah sebagai berikut:

- penyerapan DAK Fisik [Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang [sebutkan nama bidang/subbidang yang direviu] menurut hasil Reviu sebesar Rp atau ...% dari dana yang telah diterima di RKUD;
- 2. Capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Jenis Reguler/Penugasan/Afirmasi] Bidang/Subbidang sebutkan nama bidang/subbidang yang direviu| menurut hasil Reviu sebesar ... %.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil Reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan [OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan DAK Fisik tertentu].

Demikian hasil Reviu ini di	sampaikan, agar digunakan sebagaimana
mestinya.	
	Inspektur
	Provinsi/Kabupaten/Walikota,
	[Nama Lengkap] NIP
Tembusan Yth.:	
 Kepala Kantor Pelayanan Perbenda Kepala (sebutkan OPD vang me 	haraan Negara (Tempat); laksanakan urusan pengelolaan keuangan
daerah]; dan	
3. Kepala [sebutkan OPD pelaksana l	JAK FISIK].

8. Laporan Keuangan Perangkat daerah (LKPD)

a. Definisi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yangselanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

b. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

c. Tujuan

Untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsipakuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

d. Hal-Hal yang Direviu

- Penilaian atas SPI, dilakukan dengan:
 - i. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - ii. Melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
 - iii. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
 - iv. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah pelaksanaan reviu.

- 2) Melakukan reviu, berupa:
 - i. Penelusuran angka, yaitu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.
 - ii. Permintaan keterangan, yaitu dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfimasikan kepada PPKD atau perangkat daerah.
 - iii. Prosedur analitis terhadap laporan keuangan, yaitu dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.

e. Tahapan

- 1) Persiapan Reviu, terdiri dari:
 - Pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - ii. Penilaian atas SPI; dan
 - iii. Penyusunan Program Kerja Reviu.
- 2) Pelaksanaan Reviu, dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran penyusunan LKPD. Pelaksanaan Reviu dilakukan berdasarkan Program Kerja Reviu LKPD, lalu didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu. Pelaksanaan Reviu terdiri dari:
 - Penelurusan Angka;
 - Permintaan Keterangan; dan ii.
 - iii. Prosedur Analitis
- Pelaporan, hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dan memuat Catatan Hasil Reviu, lalu ditandatangani oleh Inspektur Daerah.

f. Format

Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Sistem dan Prosedur: Penerimaan Kas

Subsistem: Penerimaan Kas Melalui Bendahara Penerimaan

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
1	Penyerahan Pejabat Pengel Surat Keuangan Dae Ketetapan (PPKD) Pajak (SKP) menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan		SKP tidak diserahkan tepat waktu atau diserahkan sebelum tanggal pembayaran oleh wajib pajak. Akibatnya, tidak ada kontrol verifikasi pada saat penerimaan kas oleh bendahara penerimaan.	Register Penyerahan SKP di PPKD Register Penerimaan SKP di Bendahara	Baik
			SKP tidak diserahkan. Akibatnya, tidak ada kontrol verifikasi pada saat penerimaan kas oleh bendahara penerimaan.	Register Penyerahan SKP di PPKD Register Penerimaan SKP di Bendahara	Baik
			Nilai yang tercantum di	Proses verifikasi SKP sebelum	Tidak ada proses verifikas

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
			SKP tidak sesuai dengan yang seharusnya	ditandatangani PPKD	berpotensi menyebabkan salah saji dalam piutang pajak
		Bendahara Penerimaan melakukan administrasi penyimpanan SKP dan SKR	Lembar SKP dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tidak tersimpan dengan baik	Penyimpanan di lakukan di tempat yang aman dan hanya dapat diakses oleh pihak-phak tertentu	Baik
2	Dst				

CONTOH TABEL

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem dan Prosedur : Pengeluaran Kas Subsistem: Pengesahan DPA SKPD

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
1	Pembuatan DPA dilakukan tepat waktu	Surat pemberitahuan PPKD dibuat tepat waktu setelah adanya pengesahan anggaran	Surat PPKD terlambat dibuat yang akan menyebabkan keterlambatan proses pembuatan DPA	Tanggal dan pengiriman surat PPKD sesuai dengan jadwal seharusnya	Baik
		Pembuatan DPA oleh SKPD	Pembuatan DPA SKPD terlambat dari jadwal	Terdapat mekanisme untuk meyakinkan bahwa SKPD yang terlambat diberikan sanksi	Baik
2	Dst				

CONTOH TABEL

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem dan Prosedur: Pengeluaran Kas Subsistem: Pengajuan Dana Uang Persediaan

No	Proses	Sub Proses	Resiko	SPI yang harus ada	Hasil Penilaian
1	Penetapan Besaran UP Oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota	Analisis Anggaran Kas oleh BUD	Anggaran Kas memberikan informasi yang tidak valid karena perencanaan pencairan dana per bulan tidak lengkap	Anggaran kas tiap SKPD dipersyaratkan per bulan dan disertakan pada saat DPA SKPD diajukan	Baik
		Analisis kapasitas bendahara pengeluaran di tiap SKPD	Kesalahan identifikasi yang menyebabkan seorang bendahara diberikan uang UP melebihi kapasitas yang dimiliki	Penilaian kapasitas bendahara secara rutin	Baik
2	Bendahara mempersiapkan SPP UP	Bendahara memper- siapkan SPP UP	Melakukan pembebanan kode rekening	PPK SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP UP	PPK Dinas X tidak memahapi konsep UP. Beresiko salah saji dalam akun kas di bendahara pengeluaran
3	Dst				

Program Kerja Reviu LKPD

PKR harus memuat antara lain:

- a. Langkah kerja reviu, yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim reviu dalam melaksanakan reviu laporan keuangan;
- b. Teknik reviu, yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan langkah kerja reviu. teknik reviu meliputi antara lain: wawancara, pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik reviu lainnya yang dianggap perlu;
- c. Sumber data, yang merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan teknik reviu. sumber data dapat berasal dari data yang disediakan oleh entitas pelaporan;
- d. Pelaksana, yang merupakan nama tim reviu yang akan melakukan langkah-langkah reviu;
- e. Waktu pelaksanaan, yang menjelaskan kapan langkah-langkah reviu harus dilakukan.

Program Kerja Reviu LKPD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a) Umum

			Teknik Reviu					
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu		Angka Permintaan Keterangan	Prosedur	Analitis		
a. Pastikan bahwa rincian akun LRA telah disajikan sesuai Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (BAS) dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS.			٧					

			Teknik Reviu						
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan	е .	Prosedur	Analitis		
b. Pastikan bahwa angka Estimasi Pendapatan-LRA dan Belanja pada LRA telah disajikan sesuai DPA dengan melakukan penelusuran ke DPA atau revisinya dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DPA.			V						
c. Pastikan bahwa saldo akun LRA telah sesuai dengan saldo normal (misalnya akun Pendapatan memiliki saldo normal Kredit positif dan akun Belanja memiliki saldo normal Debit positif) dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA			٧						
d. Pastikan bahwa saldo akun LRA telah sesuai dengan Buku Besar dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA			1						
e. Pastikan secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal koreksi telah didukung dengan SKTJM/Memo Koreksi dengan menelusuri keberadaan SKTJM/Memo Koreksi beserta dokumen pendukungnya.			1						
f. Pastikan bahwa rekonsiliasi internal Pendapatan Daerah telah dilakukan antara unit akuntansi dengan SKPD teknis melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal.			1	٧					
g. Pastikan bahwa rekonsiliasi eksternal Pendapatan Daerah telah dilakukan antara unit akuntansi dengan Kas Daerah melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi.			4	٧					
h. Buat catatan hasil reviu.									

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

b) Pendapatan Daerah

Langkah Kerja Reviu	Pereviu		Teknik Reviu					
		Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis			
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalah dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Pendapatan Daerah diakui pada saat diterima oleh Kas Umum Daerah. b. Estimasi Pendapatan Daerah disajikan berdasarkan DPA danatau dokumen yang dipersamakan dengan DPA yang terakhir.								
Dokumen yang Diperlukan: a. DPA berikut revisinya dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DPA; b. Dokumen penyetoran, misalnya Surat Tanda Bukti Setor atau dokumen lain yang dipersamakan; c. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan atau dokumen lain yang dianggap sah.								
Langkah-langkah Reviu:								
a. Pastikan bahwa jumlah Pendapatan-LRA di LRA telah sesuai dengan laporan pendapatan dari SKPD terkait dan bahwa seluruh akun Pendapatan Daerah yang dikelola oleh SKPD terkait telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen terkait.			V	1				
b. Lakukan uji petik atas transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pastikan bahwa transaksi tersebut telah didukung dengan Laporan per jenis PAD dari SKPD terkait.			٧					
c. Pastikan telah dilakukan rekonsiliasi PAD dengan Kas Umum Daerah.			V					
d. Buat catatan hasil reviu								

			Teknik Reviu					
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran	Angka	Permintaan	Keterangan	Prosedur	Analitis

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

c) Belanja Daerah

Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Teknik Reviu					
			Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur			
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalah dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Belanja Daerah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah. b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. c. Anggaran Belanja Daerah disajikan berdasarkan DPA dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DPA yang terakhir.								
Dokumen yang Diperlukan: a. Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP); c. Memo Penyesuaian untuk Belanja; d. Laporan Realisasi Belanja; e. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan atau dokumen lain yang dianggap sah. Langkah-langkah Reviu:								

Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi	п	7184 VIST	
		Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
a. Teliti kesesuaian Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan Kas Umum Daerah		√	√		
b. Lakukan uji petik atas transaksi Belanja dan Teliti apakah setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D			V		-
c. Teliti bahwa pengembalian belanja untuk periode berjalan telah diakui dan dicatat sebagai Pengembalian Belanja (pengurang nilai Belanja)			V	1	
d. Teliti bahwa pengembalian belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai Lain- lain PAD yang Sah.			٧	1	
e. Teliti bahwa setiap Belanja Modal telah dicatat dan menambah Aset Tetap.			V		
f. Lakukan pengecekan antara nilai Belanja Modal dengan nilai yang menambah nilai Aset Tetap pada Laporan Barang.			4		
g. Teliti apakah informasi terkait Belanja telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.			7		
h. Buat catatan hasil reviu					

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

				Tel	knik	Re	viu	
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran	Angka	Permintaan	Keterangan	Prosedur	Analitis
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengukuran, pengakuan, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi.								

			Te	knik Re	viu
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Dokumen yang Diperlukan:					
a. LP SAL					
b. CaLK					
Langkah-langkah Reviu:					
a. Telusuri saldo pos pos akun dalam LAporan Perubahan SAL ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan			٧		
b. Telusuri saldo sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) pada LRA sama dengan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) dalam laporan perubahan SAL			1	٧	
c. Buat catatan hasil reviu					

2) Neraca

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

					mik viu	
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	renetusuran	Permintaan	Keterangan	Analitic
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengukuran, pengakuan, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran, yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal Neraca. b. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas termasuk bukti pengeluaran belum yang dipertanggungjawabkan yang sumbernya berasal dari dana UP yang belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal Neraca. c. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai rupiahnya. d. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.						
Dokumen yang Diperlukan: a. Rekening Koran; b. Buku Kas Umum; c. Buku Kas Pembantu; d. Berita Acara Pemeriksaan Kas; e. Register Penutupan Kas; f. Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP); g. Setoran/ Surat Pajak (SSP);						
h. SPM , SP2D-UP dan SP2D-TUP; i. Memo Penyesuaian Kas di Bendahara Pengeluaran; j. Bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah Reviu:						

				Tekr	
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penetusuran	Perfinintaan	Kerengan
a. Teliti bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca hanya mencakup UP dan TUR dengan membandingkan saldo kas (Uang Tunai d Brankas, Saldo rekening Koran di Bank, bukti-bukt pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, dar tidak termasuk Jasa Giro) dengan SP2D-UP dan SP2D TUP.	i i		٧	٧	
b. Teliti bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disajikan sebesar nilai rupiahnya, dengan melakukar penelusuran ke Register Penutupan Kas.	9.		1		
c. Teliti bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran adalah nihil, melalui penelusuran ke Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil, maka Teliti apakah saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya.	n r		٧		
d. Teliti bahwa jumlah pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan adalah sesuai dengan Berita Acara Register Pemeriksaan Kas, Penutupan Kas, dar bukti-bukti melalui Penelusuran ke dokumen-dokumen pengeluarannya.	a i		4		
e. Buat catatan hasil reviu			T	1	

b) Kas di Bendahara Penerimaan

			Tel	cnik Rev	riu
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. 2. Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca adalah kas yang benar-benar menjadi hak Daerah pada tanggal Neraca. 3. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai rupiahnya. 4. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. 5. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari Laporan Keadaan Kas (LKK) Bendahara Penerimaan yang dilampiri bukti penerimaan kas dari wajib pungut. 6. Pada akhir tahun, saldo Kas di Bendahara Penerimaan harus nihil, namun apabila tidak nihil maka harus disajikan dalam Neraca.					

			Tek	nik Rev	iu
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Dokumen yang Diperlukan:					7.
a. Rekening Koran;					
b. Buku Kas Umum;					
c. Buku Kas Pembantu;					
d. Berita Acara Pemeriksaan Kas;					
e. Register Penutupan Kas;					
f. Memo Penyesuaian Kas;					
g. Bendahara Penerimaan;					
h. SSBP dan SSP.					
Langkah-langkah Reviu:					
a. Teliti bahwa saldo Kas yang di Bendahara					
Penerimaan disajikan di Neraca hanya					
mencakup hak negara yang belum					
disetorkan dan tidak mencakup uang milik		V	at .		
pihak ketiga (seperti uang hasil lelang pihak		, v	٧		
ketiga dan uang jaminan), melalui					
perbandingan dengan perhitungan yang					
dibuat oleh unit teknis.					
b. Teliti bahwa saldo kas di Bendahara					
Penerimaan pada akhir tahun anggaran					
adalah nihil melalui penelusuran ke Berita					
Acara Pemeriksaan Kas dan Register			V		
Penutupan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil,			125		
maka Teliti bahwa saldo tersebut telah					
disetorkan ke Kas Daerah, melalui					
penelusuran ke dokumen SSBP-nya.					,
c. Teliti apakah saldo Kas di Penerimaan					
Bendahara telah disajikan sebesar nilai					
rupiahnya dengan menelusuri Register					
Penutupan Kas. Apabila terdapat saldo kas					
dalam valuta asing, Teliti bahwa saldo			175-1		
tersebut telah dikonversi kedalam Rupiah			V	V	
dengan menggunakan kurs tengah Bank					
Indonesia pada tanggal Neraca melalui					
permintaan keterangan dan perbandingan ke					
kurs tengah Bank Indonesia per tanggal					
Neraca.					

				Tek	mik	Rev	iu	
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran	Angka	Permintaan	Keterangan	Prosedur	Analitis
d. Buat catatan hasil reviu								

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

c) Kas Lainnya dan Setara Kas

			Te	knik	c Re	viu
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan	Keterangan	Prosedur
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, dan pengukuran, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Kas Lainnya adalah kas selain yang berasal dari Uang Persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara, uang Pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai, atau pajak/retribusi yang belum disetor. b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. c. Kas Lainnya dan Setara Kas dicatat sebesar nilai rupiah nominal. Apabila terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. d. Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. e. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi tersebut memiliki masa jatuh tempo paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.						

Dokumen yang Diperlukan:		
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas; b. Sertifikat Deposito atau sertifikat lain yang berkaitan dengan investasi jangka pendek – paling lama 3 bulan.		
Langkah-langkah Reviu:		
a. Teliti bahwa uang pada bendahara pengeluaran selain uang persediaan telah dicatat ke dalam akun Kas Lainnya dan Setara Kas.	٧	V
b. Teliti apakah saldo Setara Kas yang disajikan di Neraca hanya mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid seperti Deposito yang berjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, melalui penelusuran ke Sertifikat Deposito.	1	
c. Buat catatan hasil reviu		

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

d) Belanja Dibayar Dimuka

			Te	knik	Re	viu	
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran	Permintaan	Keterangan	Prosedur	Analitis
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan. Dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. b. Belanja Dibayar di Muka dicatat sesuai nilai penyesuaian Belanja Dibayar di Muka yang diakui pada periode pelaporan.							

Dokumen yang Diperlukan: a. Dokumen Realisasi Belanja; dan b. Dokumen perjanjiah/kontrak atau dokumen lainnya yang dipersamakan.		
Langkah-langkah Reviu:		
a. Teliti bahwa Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.	~	1
b. Teliti bahwa saldo Belanja Dibayar di Muka telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai nilai yang diakui pada periode pelaporan dan telah didukung oleh Memo Penyesuaian.	4	
c. Lakukan uji petik atas Belanja Dibayar di Muka dan Teliti bahwa setiap transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen terkait.	V	
d. Buat catatan hasil reviu		

e) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

			Tek	nik Rev	riu
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah Pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara. b. Pendapatan Yang Harus Diterima dicatat sebesar penyesuaian atas nilai Pendapatan Yang Harus Diterima pada periode berjalan sesuai yang terdapat dalam kontrak atau dokumen perjanjian yang dipersamakan.					
Dokumen yang Diperlukan: Dokumen perjanjian/kontrak atau dokumen lainnya yang dipersamakan.					
Langkah-langkah Reviu:					
a. Teliti bahwa pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima dalam periode berjalan telah dibukukan sebagai Pendapatan yang Masih Harus diterima dan telah diakui sebagai di Neraca pada pos Aset Lancar.		V	1		
b. Teliti bahwa saldo akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima telah dicatat dalam jurnal penyesuaian sesuai nilai yang diakui pada periode pelaporan clan telah didukung oleh Memo Penyesuaian.			٧		

c. Lakukan uji petik atas transaksi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dan Teliti apakah setiap transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen terkait.	1	
d. Buat catatan hasil reviu		

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

f) Piutang Pendapatan

			Tek	nik	Re	viu	
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan	Keterangan	Prosedur	Analitis
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengukuran, dan pengakuan, pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Piutang Pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. b. Saldo Piutang Bukan Pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dengan memperhitungkan besarnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.							

Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan Keterangan	Prosedur	Analitis
					A
a					
t /					
1		√	1		
n		4			
l i		A	1		
	a a a a a a a b a b a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a b a a a b a a a b a a a b a a a b a a a b a a a b a a a b a a a b a a a b a a a a b a	a n t t / l l l l l l l l l l l l l l l l l			

g) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

			Tek	nik R	eviu	
Langkah Kerja Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Permintaan	Prosedur	Analitis
Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam dilakukan rangka penyajian nilai bersih Piutang yang dapat direalisasi (net realizable value). b. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan yang peraturan ketentuan berlaku.						
Dokumen yang Diperlukan: Dokumen terkait PNBP dan kertas kerja perhitungannya						
Langkah-langkah Reviu:					T	
a. Teliti bahwa perhitungan penyisihan piutang telah sesuai dengan peraturan/ketentuan berlaku.		1	4			
b. Teliti bahwa saldo atas akun Piutang Penyisihan Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak telah didukung dengan kertas melalui perhitungan kerja penelusuran ke kertas kerja, dan pendukung dokumen perhitungan kembali.			4			
c. Buat catatan hasil reviu					T	

Prinsip Dasar:

h) Persediaan

			Tek	nik	Rev	viu	
Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran	Aneka	Permintaan	Keterangan	Prosedur	Analitis
	Pereviu	Pereviu	600	200	7485		Pereviu Estimasi Waktu Horen H

		Tel	tnik Re	viu
Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran	Permintaan Keterangan	Prosedur Analitis
		٧	٧	
		1		
		1		
-				
		Pereviu Waktu	Pereviu Estimasi Waktu	

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

i) Aset Tetap

	Langkah Kerja			Т	eknik l	Reviu
	Tujuan Reviu: Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan
a	Tujuan Reviu:					
	Tujuan Langkah Kerja reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengukuran, pengakuan, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP, serta					

			T	eknik R	eviu
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan
akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum, 2) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.					
 Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal jika Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, 					
4) Bukti dan kepemilikannya terdokumentasi dengan memadai, serta dikuasai oleh Daerah dan dimanfaatkan untuk keperluan penyusunan neraca awal,					
5) biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.					
6) Untuk periode selanjutnya, untuk setiap perolehan Aset Tetap baru, entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar (bila tidak ada biaya perolehannya).					
7) Biaya perolehan Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka memperoleh aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja					

			Т	eknik R	eviu
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan
untuk penggunaan yang dimaksudkan. 8) Aset Tetap disajikan berdasarkan perolehan aset tetap tersebut dikurangi biaya akumulasi penyusutan. 9) Apabila penyelesaian pekerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang selesai tersebut belum digolongkan dan disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan aset tersebut selesai					
dan siap dipakai. 10) Biaya perolehan dari Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang					
bersangkutan. 11) Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh (nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan).					
12) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.					

				T	eknik R	eviu
	Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan
	 13) Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. 14) Biaya aset yang baru dliperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. 15) Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA. 					
)	Dokumen yang diperlukan: 1) Laporan Realisasi Anggaran 2) Neraca 3) Kartu Inventaris Barang (KIB))- -		
	4)					
3	Langkah-langkah Reviu					
	 Teliti bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK. Teliti bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan Lampiran Barang Daerah, melalui penelaahan Lampiran Barang Daerah. Teliti bahwa Aset Tetap (misalnya Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK. Teliti bahwa Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui 					

			Т	eknik R	eviu
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan
permintaan keterangan. 5) Teliti bahwa setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain, melalui rekonsiliasi antara Daftar Realisasi Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain yang berasal dari pembelian, pengembangan nilai aset, Aset Tetap dalam renovasi, perolehan KDP, dan pengembangan KDP. 6) Teliti bahwa mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam Aplikasi Barang Daerah telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, Perolehan Lainnya, Pengurangan Nilai Aset, Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas, Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset, Penerimaan Aset Tetap Renovasi, Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah (Keluar), Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait. 7) Teliti bahwa untuk Aset Tetap yang dalam kondisi Rusak Berat/Usang telah direklasifikasi ke Aset Lainnya, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen Berita Acara Penghentian Penggunaan Aset Tetap ke akun Aset Lainnya.					

			Т	eknik F	Reviu
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
9) Lakukan uji petik atas transaksi Belanja dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D.					
10)Pastikan bahwa pengembalian Belanja hanya merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB.					
11)Pastikan bahwa pengembalian Belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain, dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSBP.					
12)Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dicatat sebagai penambahan Aset tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D dan prosedur analitis dengan penambahan saldo Aset Tetap.					

Laporan Operasional (LO) j)

			5	Teknik Reviu				
	Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan		
1	Pendapatan							
ì	Tujuan Reviu:							
	Untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun pendapatan telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi yaitu: 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).							
D	Dokumen yang diperlukan: 1) Laporan Operasional;							
	Laporan Realisasi Anggaran.							
	Langkah-langkah Reviu							
	Pastikan saldo akun pendapatan dalam setiap Laporan operasional sesuai dengan saldo dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang terkait baik data, Buku Besar, Kartu Piutang,			٧	V			
	2) Pastikan semua pendapatan memang telah terjadi (sudah merupakan hak) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun berikutnya → Pendapatan diterima dimuka				V			
	3) Pastikan semua pendapatan memang telah terjadi (sudah merupakan hak) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun sebelumnya →				٧			

				Teknik Reviu				
	Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan		
	 Pembayaran Piutang 4) Pastikan telah menginput semua pendapatan yang telah terjadi yang belum diterima pembayarannya → Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 5) Apakah pendapatan perjenis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan Transfer, Lain Lain Pendapatan yang syah, dalam Laporan Operasional sesuai dengan realisasi pendapatannya (Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan Transfer, Lain Lain Pendapatan yang syah)) dalam Laporan Realisasi Anggaran ? 6) Pastikan apabila Pendapatan LRA > Pendapatan LO: a) Terdapat penerimaan pembayaran Piutang (Pendapatan YMHD); dan b) Terdapat penambahan akun Pendapatan Diterima Dimuka. 7) Pastikan apabila Pendapatan LRA < Pendapatan LO: a) Terdapat Piutang /Pendapatan YMHD baru; dan 			1	N N			
2	b) Terdapat pengurangan akun Pendapatan Diterima Dimuka. 8) Buat catatan hasil reviu Beban							
а	Tujuan Reviu:							
	Untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun beban telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi yaitu: 1) Timbulnya Kewajiban							

				Т	eknik Re	eviu
	terjadinya peralihan hak dari pihal lain ke pemerintah tanpa diikut keluarnya kas dari kas umum daerah. 2) Terjadinya Konsumsi Aset Terjadinya konsumsi aset adalah saa pengeluaran kas kepada pihak lair yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi ase	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan
	Terjadinya Konsumsi Aset Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional					
b.	Dokumen yang diperlukan : 1) Laporan Operasional; 2) Laporan Realisasi Anggaran; 3) Buku persediaan; 4) Laporan Stock Opname; 5)					
c.	Langkah-langkah Reviu					

			Т	eknik R	eviu
Langkah Kerja 1) Pastikan saldo akun beban dalam	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan
Pastikan saldo akun beban dalam setiap Laporan operasional sesuai dengan saldo dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang			4		
terkait baik data, Buku Besar, Kertas Kerja Persediaan, Kartu Piutang, Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Persediaan,				4	
 Pastikan semua beban memang telah terjadi (sudah merupakan kewajiban) pada tahun berjalan → bukan terjadi 				√	
pada tahun berikutnya → Beban dibayar dimuka				1	
3) Pastikan telah menginput semua beban yang telah terjadi yang belum dilakukan pembayarannya → Beban/Belanja Yang Masih Harus Dibayar				1	
Teliti apabila ada kontrak sewa yang lintas tahun anggaran				V	
 Apakah beban perjenis Belanja (beban Pegawai/persediaan/beban jasa/beban pemeliharaan/ beban perjalanan dinas) 			V		
dalam Laporan Operasional sesuai dengan realisasi belanjanya (belanja Pegawai/ persediaan/ jasa/ pemeliharaan/ perjalanan dinas) dalam Laporan Realisasi Anggaran?				√ 	
6) Pastikan apabila Belanja LRA > Beban LO:			V	V	
a) Terdapat pembayaran Piutang (Belanja/Beban YMHD); dan b) Terdapat penambahan akun Beban			1	\ \	
Dibayar Dimuka. 7) Pastikan apabila Belanja LRA < Beban			al.		

			Teknik Reviu			
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisis	Permintaan keterangan	
LO: a) Terdapat Utang (Belanja/Beban Yang Masih Harus Dibayar) baru; dan b) Terdapat pengurangan akun Beban Dibayar Dimuka. 8) Apakah Beban penyusutan dalam Laporan Operasional sesuai dengan Pertambahan akumulasi penyusutan dalam Neraca? 9) Apakah beban penyisihan piutang tak tertagih dalam Laporan Operasional sesuai dengan perubahan penyisihan piutang tak tertagih dalam neraca? 10) Apakah Beban persediaan dalam Laporan Operasional yang merupakan pemakaian sejalan dengan realisasi belanja persediaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta sisa persediaannya (yang merupakan selisih antara pembelian dengan pemakaian) tercatat sebagai Saldo Persediaan dalam Neraca?						

k) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

			T	eknik R	nik Reviu	
Langkah Kerja		Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa keterangan	
Tujuan Reviu:						
Untuk memastikan bahwa penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir sesuai dengan SAP						
Dokumen yang diperlukan: a. Laporan Operasional; b. Laporan Realisasi Anggaran; c						
Langkah-langkah Reviu						
a. Pastikan saldo akun dalam setiap Laporan perubahan ekuitas sesuai dengan saldo dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang terkait baik data, Buku Besar. b. Pastikan Saldo Surplus/Defisit pada			Ŋ	٧		
LO akan menambah/mengurangi saldo Ekuitas pada LPE, serta Saldo akhir Ekuitas pada LPE akan terbawa			V	√	٧	
c. Periksa apakah terdapat koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti: 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;			N	√	V	
Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d. Periksa adanya koreksi atau kesalahan			V	√	√	

			Teknik Reviu			
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa	
yang berpengaruh kepada penyajian LPE berupa: 1) Koreksi yang merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 2) Kesalahan yang merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya meliputi Kesalahan tidak berulang dan sistemik. e. Pastikan adanya kesalahan tidak berulang berupa kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang berpengaruh pada LPE terdiri			₹	*	V	
atas: 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. f. Pastikan adanya kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang dan berpengaruh pada LPE. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah			√	√	4	

			T	eknik R	Reviu	
Langkah Kerja diketahui. g. Identifikasi adanya jenis-jenis	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa	
diketahui.						
g. Identifikasi adanya jenis-jenis kesalahan yang berpengaruh kepada						
LPE meliputi:						
1) Koreksi kesalahan yang tidak						
berulang yang terjadi pada periode						
berjalan, baik yang mempengaruhi						
posisi kas maupun yang tidak,						
dilakukan dengan pembetulan pada						
akun yang bersangkutan dalam						
periode berjalan, baik pada akun						
pendapatan-LRA atau akun belanja,						
maupun akun pendapatan-LO atau						
akun beban.						
2) Koreksi kesalahan yang tidak						
berulang yang terjadi pada periode-						
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila						
laporan keuangan periode tersebut						
belum diterbitkan, dilakukan						
dengan pembetulan pada akun yang						
bersangkutan, baik pada akun						
pendapatan-LRA atau akun belanja,						
maupun akun pendapatan-LO atau						
akun beban.						
3) Koreksi kesalahan atas beban yang						
tidak berulang, sehingga						
mengakibatkan pengurangan						
beban, yang terjadi pada periode-						
periode sebelumnya dan						
mempengaruhi posisi kas dan tidak						
mempengaruhi secara material						
posisi aset selain kas, apabila						
laporan keuangan periode tersebut						
sudah diterbitkan, dilakukan						
dengan pembetulan pada akun						

			T	eknik R	eviu
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa keterangan
pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas. 4) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 5) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban barsangkutan. 1) Buat catatan hasil reviu					

			Teknik Reviu				
Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran	Angka	Prosedur Analisi	Permintaa	keterangan

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, Maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang

1) Laporan Arus Kas (LAK)

				To	eknik R	eviu
	Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa keterangan
1.	Tujuan Reviu:					
	Untuk memastikan bahwa penyajian LAK yang meliputi informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan sesuai dengan SAP					
2.	Dokumen yang diperlukan: a. Laporan Arus Kas; b					
3.	Langkah-langkah Reviu					
	a. Pastikan saldo setiap akun dalam setiap Laporan Arus Kas sesuai dengan saldo dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) maupun dalam dokumen pendukung lain yang terkait baik data, Buku Besar. b. Pastikan Klasifikasi LAK berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dengan rincian sebagai berikut: 1) AKTIVITAS OPERASI			N	V	

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Teknik Reviu			
			Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa	
Aktivitas operasi adalah aktivitas						
penerimaan dan pengeluaran kas						
yang ditujukan untuk kegiatan						
operasional pemerintah selama satu						
periode akuntansi diperoleh dari:						
a) Penerimaan Perpajakan;						
b) Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP);						
c) Penerimaan Hibah;				V		
d) Penerimaan Bagian Laba				3		
perusahaan negara/daerah dan						
Investasi Lainnya;						
e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan						
dari pendapatan Luar Biasa; dan						
Penerimaan Transfer.						
Arus keluar kas untuk aktivitas						
operasi terutama digunakan untuk:			1			
a) Pembayaran Pegawai;				V		
b) Pembayaran Barang;						
c) Pembayaran Bunga;						
d) Pembayaran Subsidi;						
e) Pembayaran Hibah;			V	√		
f) Pembayaran Bantuan Sosial;						
g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian						
Luar Biasa; danPembayaran						
Transfer.						
2) AKTIVITAS INVESTASI						
Aktivitas investasi adalah aktivitas						
penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan						
pelepasan aset tetap serta investasi						
lainnya yang tidak termasuk dalam						
setara kas.			V			
Arus masuk kas dari aktivitas			CON11			
investasi terdiri dari:						
a) Penjualan Aset Tetap;						

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Teknik Reviu			
			Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa	
b) Penjualan Aset Lainnya;						
c) Pencairan Dana Cadangan;						
d) Penerimaan dari Divestasi; dan						
e) Penjualan Investasi dalam bentuk						
Sekuritas,						
Arus keluar kas dari aktivitas						
investasi terdiri dari:						
a) Perolehan Aset Tetap;						
b) Perolehan Aset Lainnya;						
c) Pembentukan Dana Cadangan;						
d) Penyertaan Modal Pemerintah; dan						
e) Pembelian Investasi dalam bentuk						
Sekuritas.						
3) AKTIVITAS PENDANAAN						
Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas						
penerimaan dan pengeluaran kas						
yang yang berhubungan dengan						
pemberian piutang jangka panjang						
dan/atau pelunasan utang jangka						
panjang yang mengakibatkan						
perubahan dalam jumlah dan						
komposisi piutang jangka panjang						
dan utang jangka panjang.						
Arus masuk kas dari aktivitas						
pendanaan antara lain:						
a) Penerimaan utang luar negeri;						
b) Penerimaan dari utang obligasi;						
c) Penerimaan kembali pinjaman						
kepada pemerintah daerah; dan						
d) Penerimaan kembali pinjaman						
kepada perusahaan negara.						
Arus keluar kas dari aktivitas						
pendanaan antara lain:						
a) Pembayaran pokok utang luar						
negeri;						

Langkah Kerja	Pereviu	Estimasi Waktu	Teknik Reviu			
			Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa	
b) Pembayaran pokok utang obligasi;						
 c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; dan 						
d) Pengeluaran kas untuk						
dipinjamkan kepada perusahaan negara.						
4) AKTIVITAS TRANSITORIS						
Aktivitas transitoris adalah aktivitas						
penerimaan dan pengeluaran kas						
yang tidak termasuk dalam aktivitas						
operasi, investasi, dan pendanaan.						
Arus masuk kas dari aktivitas						
transitoris meliputi penerimaan PFK						
dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan						
penerimaan kembali uang						
persediaan dari bendahara						
pengeluaran.						
Arus keluar kas dari aktivitas						
transitoris meliputi pengeluaran PFK						
dan pengeluaran transitoris seperti						
kiriman uang keluar dan pemberian						
uang persediaan kepada bendahara						

m) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

				Teknik Reviu				
Langkah Kerja		Pereviu	Estimasi Waktu	Penelusuran Angka	Prosedur Analisi	Permintaa keterangan		
1.	Tujuan Reviu:							
	Untuk memastikan bahwa penyajian							
2.	Dokumen yang diperlukan : a. LRA; b. LO; c. Neraca; d. LPE; e. LAK; dan f. LP SAL.							
3.	Langkah-langkah Reviu							
	diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, Akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai Uika ada), mutasi aset tetap lainnya; 3) Informasi penyusutan; 4) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap; 5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap; 6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; 7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap; dan 8) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal tambahan yang harus diungkapkan: dasar peraturan untuk menilai							

Pereviu	Estimasi Waktu	Teknik Reviu				
		Penelusuran	Angka	Prosedur Analisi	Permintaa	keterangan
	Pereviu		Pereviu Waktu Dengangan	Pereviu Waktu Bygygy	Pereviu Waktu Penelusuran Angka Angka Prosedur Analisi	Penelusuran Angka Prosedur Analisi Permintaa

Kertas Kerja Reviu LKPD

Pelaksanaan reviu didokumentasikan dalam KKR untuk menjelaskan mengenai:

- 1. Pihak yang melakukan reviu;
- 2. Entitas yang direviu;
- 3. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) yang direviu;
- 4. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan
- 5. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar pereviu.

KKR memuat:

- 1. Tujuan reviu;
- 2. Daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
- 3. Langkah kerja prosedur penelusuran angka, analitis, permintaan keterangan.

Mengingat adanya perbedaan keadaan pada setiap penugasan reviu atas laporan keuangan, maka tidak mungkin menentukan bentuk atau isi KKR yang perlu dibuat. Namun perlu diperhatikan bahwa KKR harus memuat masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan dan prosedur analitis serta masalah yang dianggap tidak biasa selama melaksanakan reviu termasuk penyelesaiannya.

Kegiatan reviu dituangkan dalam KKR sebagai pertanggungjawaban bahwa langkah kerja reviu telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dokumentasi pelaksanaan reviu. Kualitas hasil reviu akan lebih terjamin jika didukung oleh KKR yang baik, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Kertas kerja disusun pada saat kegiatan reviu berlangsung.
- 2. Kertas kerja disusun dengan lengkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengacu kepada tahapan reviu yang telah ditetapkan.
 - b. Daftar isi KKR telah sesuai dengan fisik KKR-nya.
 - c. Disusun secara terstruktur dengan memperhatikan kesesuaian antara informasi utama dan data pendukung.

- d. Berisi permasalahan yang ditemukan, baik yang telah ditindaklanjuti, masih dalam proses tindak lanjut, atau tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh unit akuntansi yang bersangkutan.
- e. Memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Relevan: Informasi yang dimuat dalam KKR harus berhubungan dengan tujuan reviu dan permasalahan yang dihadapi.
 - 2) Sesuai dengan PKR: Prosedur reviu dalam PKR yang tidak dilaksanakan atau diubah perlu dibuat penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatalan atau perubahannya.
 - 3) Lengkap dan Cermat: Informasi dan data dalam KKR harus lengkap dan cermat agar mendukung simpulan, LHR, permasalahan dan rekomendasinya.
 - 4) Mudah Dipahami: KKR harus menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan alur pikir yang kronologis. Judul harus jelas untuk setiap permasalahan/topik. Simbol (tickmark) harus digunakan secara konsisten selama reviu serta diberi penjelasan yang memadai.
 - 5) Rapi: Berhubungan dengan tata penulisan, ruang pengorganisasian dan pengelolaan fisik KKR. Harus ditulis pada satu muka, apabila diperlukan untuk menulis pada halaman sebaliknya, harus dibuat petunjuk yang jelas. KKR harus diberi daftar isi, penomoran dan pemberian indeks secara sistematis, serta pemberian referensi yang jelas untuk menghubungkan informasi/data antar berbagai lembar KKR.
 - 6) Efisien: Harus dihindari pembuatan daftar yang tidak perlu, dan dimungkinkan menggunakan salinan (copy) dari catatan obyek yang direviu. APIP sebaiknya memberikan simbol (tickmark) untuk menandai reviu yang dilakukan.

Contoh penyusunan KKR sebagai berikut:

Kertas Kerja Reviu LKPD

a. KKR LRA

Pemerintah Daerah			No.	Indek	s KKR	KKR BEL		
Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat		Dist	usun c	oleh/Tang	FA/01-	Mar-17		
		Dire	eviu ol	eh/Tangg	NC/01-Mar-17			
			Disc	etujui	oleh/Tan	IL/01-1	Mar-17	
SKPKD				PPKI) (DPKAD		1,434-5, 91,439	
Perangkat Daerah				Dina	s Pendap	atan		
			-		A STATE OF THE STA			
Komponen LK				N	LO	LAK	LPE	CALK
Akun			Bela	anja		100	W St	-
Langkah-langkah	Reviu			200				
Daerah melal Rekonsiliasi	ui permin	taan ketera	ngan	dan	penelusu	ran angl	ca ke B	erita Acara
 Lakukan uji p telah didukun dan SP2D. 			0.00					
 Pastikan bahw untuk periode ke dokumen S 	berjalan, r							
 Pastikan bahw Pendapatan La transaksi ke de 	ain-lain, de	ngan melaku						
		lania Modal t				78 79	770151107	
 Pastikan bahw melakukan penambahan s 	enelusuran	dokumen						
melakukan p	enelusuran saldo Aset T	dokumen etap.	SPM	dan	SP2D da	an prose	dur anal	

2. Uji Petik SPM dan SP2D	BEL-2.0
3. Penelaahan Pengembalian Belanja Periode Berjalan	BEL-3,0
4. Penelaahan Pengembalian Belanja Periode Sebelumnya	BEL-4.0
5. Penelaahan Penambahan Aset Tetap dengan Belanja Modal	BEL-5.0
Simpulan: Komentar	7/1

b. KKR Neraca

Pemerintah Daera	Pemerintah Daerah		No. Indeks KKR				KKR NERACA	
Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat		Dis	usun	oleh/Tan	ggal	FA/01-Mar-17		
		Dir	eviu ol	eh/Tangg	NC/01- Mar-17 IL/01- Mar-17			
		Dis	etujui	oleh/Tan				
SKPKD			1	PPKD (DPKAD)				
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		1	Dina	s Pendap	atan		
Komponen LK	LRA	LPSAL	I V	N	LO	LAK	LPE	CALK
Akun			Aset Tetap					
Langkah-langkah	Davin		Asc	t Icta				

- 1. Teliti bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK.
- 2. Teliti bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan Lampiran Barang Daerah, melalui penelaahan Lampiran Barang Daerah.
- 3. Teliti bahwa Aset Tetap (misalnya Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK.
- 4. Teliti bahwa Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui permintaan keterangan.
- 5. Teliti bahwa setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain, melalui rekonsiliasi antara Daftar Realisasi Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain yang berasal dari pembelian, pengembangan nilai aset, Aset Tetap dalam renovasi, perolehan KDP, dan pengembangan KDP.
- 6. Teliti bahwa mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam Aplikasi Barang Daerah telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, Perolehan Lainnya, Pengurangan Nilai Aset, Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas, Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset, Penerimaan Aset Tetap Renovasi, Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah (Keluar), Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, melalui

- penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait.
- 7. Teliti bahwa untuk Aset Tetap yang dalam kondisi Rusak Berat/Usang telah direklasifikasi ke Aset Lainnya, melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen Berita Acara Penghentian Penggunaan Aset Tetap ke akun Aset Lainnya.
- 8. Teliti bahwa Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)	No. Indeks KKR	
Penelaahan Kesesuaian Saldo Aset Tetap dengan CaLK	AT-100	
2. Penelaahan. Kesesuaian Saldo Aset Tetap dengan Lampiran Barang Daerah	AT-200	
3. Penelaahan Dokumen Kepemilikan Barang Daerah dan Pengungkapannya dalam CaLK	AT-300	
4. Penelaahan Pemanfaatan Barang Daerah dan Pengungkapannya dalam CaLK	AT-400	
5. Rekonsiliasi Belanja Modal dengan Penambahan Aset Tetap dari Pembelian	AT-500	
6. Penelaahan Mutasi Tambah Kurang Barang Daerah dengan Dokumen Sumber	AT-600	
7. Penelaahan Reklasifikasi Aset Tetap Rusak Berat	AT-700	
8. Penelahaan Penyusutan Aset Tetap	AT-800	

Simpulan:

- Terdapat selisih nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.000.000,00 yang kurang diungkapkan dalam CaLK.
- 2. Terdapat kurang saji Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp25.000.000,00 karena Aplikasi Barang Daerah yang diinput ke Aplikasi Akuntansi belum yang terakhir.

Usulan jurnal koreksi:

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Rp25.000.000,00 Ekuitas Dana Rp25.000.000,00

- 3. Terdapat 2 bidang tanah senilai Rp300 .000. 000,00 yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan dan belum diungkapkan dalam CaLK.
- 4. Penjelasan pemanfaatan aset tetap:
 - a) Terdapat 1 bidang tanah senilai Rp500.000. 000,00 yang tidak dimanfaatkan (tanah kosong) belum diungkapkan dalam CaLK.
 - b) Terdapat 5 Gedung dan Bangunan berupa rumah dinas yang ditempati oleh pihak yang tidak berhak (pensiunan) belum diungkapkan dalam CaLK.
- 5. Rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan Aset Tetap dari pembelian:
 - a) Terdapat kurang saji Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp30. 000.000,00 karena terdapat terdapat pembelian Peralatan dan Mesin yang belum diinput dalam Aplikasi Barang Daerah.

Usulan Jurnal Koreksi:

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Rp30.000.000,00

Ekuitas Dana

Rp30.000.000,00

b) Terdapat kurang saji Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp10.000.000,00 yang berasal dari belanja barang (pembelian notebook dengan menggunakan mata anggaran belanja barang) dan belum diinput di Aplikasi Barang Daerah serta belum diungkap dalam CaLK.

Usulan Jurnal Koreksi:

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Rp10.000.000,00

Ekuitas Dana

Rp10.000.000,00

6. Terdapat Transfer Masuk Peralatan dan Mesin berupa komputer senilai Rp50.000.000,00 yang belum dicatat.

Usulan Jurnal Koreksi:

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Rp50.000.000,00

Ekuitas Dana

Rp50.000.000,00

- 7. Uji petik telah dilakukan terhadap mutasi Aset Tetap, dimana seluruh transaksi mutasi Aset Tetap telah didukung dengan dokumen sumber.
- 8. Terdapat Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat senilai Rp200.000.000,00 yang belum direklasifikasi ke Aset Lainnya.

Usulan Jurnal Koreksi:

Aset Lainnya - Aset Lain-lain

Rp200.000.000,00

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Rp200.000.000,00

9. Perhitungan Penyusutan telah sesuai dengan ketentuan.

Komentar

KKR telah lengkap.

c. KKR CaLK

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat		No.	s KKR	KKR CALK					
		Dis	FA/01- Mar-17 NC/01- Mar-17 IL/01- Mar-17						
		Dir							
		Dis							
SKPKD				PPKD (DPKAD)					
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		1	Dina	s Pendap	atan			
							11 10 10 10 10 10		
Komponen LK	LRA	LPSAL		N	LO	LAK	LPE	N	CALK
Akun			Aset Tetap					70	

Langkah-langkah Reviu

- 1. Teliti apakah Aset Tetap disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan,
 - c. Akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai Uika ada), mutasi aset tetap lainnya;
 - d. Informasi penyusutan;
 - e. Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
 - f. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
 - g. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - h. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
 - i. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal tambahan yang harus diungkapkan: dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen Uika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)	No. Indeks KKR
Penelaahan pengungkapan Aset Tetap	CaLK-1.0
Simpulan:	
4. 마른 생선에 보면 전혀 살아보고 하는 것이 이렇게 하고 있다면 하는데	n poin b dan e belu
Pengungkapan Aset Tetap poin a, d, f, g, dan h telah memadai sedangka memadai. Dst	n poin b dan e belu
memadai.	n poin b dan e belt

d. KKR LO

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat		No.	No. Indeks KKR					KKR LO		
		Disusun oleh/Tanggal				FA/01- Mar-17 NC/01- Mar-17 IL/01- Mar-17				
		Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal								
SKPKD				PPKD (DPKAD))	-		
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Dinas Pendapatan						
Komponen LK	LRA	LPSAL		N	N	LO	LAK	LPE	CALK	
Akun			Aset Tetap							

Langkah-langkah Reviu

(1) Analisis Pendapatan

- Pastikan semua pendapatan memang telah terjadi (sudah merupakan hak) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun berikutnya → Pendapatan diterima dimuka
- Pastikan semua pendapatan memang telah terjadi (sudah merupakan hak) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun sebelumnya → Pembayaran Piutang
- Pastikan telah menginput semua pendapatan yang telah terjadi yang belum diterima pembayarannya → Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- Teliti apabila ada kontrak sewa yang lintas tahun anggaran
- (2) Lakukan Analisis beban
- Pastikan semua beban memang telah terjadi (sudah merupakan kewajiban) pada tahun berjalan → bukan terjadi pada tahun berikutnya → Beban dibayar dimuka
- Pastikan telah menginput semua beban yang telah terjadi yang belum dilakukan pembayarannya → Beban/Belanja Yang Masih Harus Dibayar
- Teliti apabila ada kontrak sewa yang lintas tahun anggaran
- (3) Analisa Belanja dalam LRA dan Beban dalam LO Keterkaitan /hubungan antara akun belanja dalam LRA serta Akun Beban pada LO dapat dijelaskan dalam table berikut:

		alisasi Anggaran (LRA)	Laporan Op			
No	Uraian Rp		Uraian	Rp	Keterangan	
1	Belanja Pegawai	22.926.085.317	Beban Pegawai	22.910.502.638	Selisih (1) 15.582.679	
2	Belanja Barang	22.298.746.637	Beban persediaan	168.740.460		
			Beban Barang dan Jasa	6.035.302.896		
			Beban Pemeliharaan	1.432.106.979		
			Beban Perjalanan Dinas	14.455.389,762		

	Jumlah	22.298.746.637	22.091.540.097	Selisih (2) 207.206.540
Realisas sebesar sebesar Hal ini teknik	i belanja peg Rp22.926.085 Rp22.910.502. perlu dilakuk wawancara/pe	gkah-langkah Reviu (Daftar KK awai berdasarkan laporan 317 berbeda dengan beban 638 sehingga terdapat selisih F an penelusuran lebih jauh d rmintaan keterangan dengan i perbedaan ini, apakah ada t	realisasi anggaran pegawai dalam LO Rp15.582.679. dengan melakukan n petugas SAIBA	o. Indeks KKR
				LO-1.0
Simpula	n:			
Dst				
Komenta	ur			
KKR tela	h lengkap			

Catatan Hasil Reviu LKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota
Inspektorat Daerah
CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN (PROV/KAB/KOTA/Perangkat Daerah)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

Provinsi/Kabupaten/Kota		Disusun	
Inspektorat Daerah		oleh/Tanggal	
KERTAS		Direviu	
		oleh/Tanggal	
		Disetujui	
		oleh/Tanggal	
Pemerintah Daerah		'	
Perangkat Daerah	x		
Uraian Catatan Hasil	Reviu		Indeks KKR
Penyelenggaraan Aku	ıntansi:		
1.			KKR-BEL
2.			KKR-AT
3.			KKR-CaLK
4.			KKR-LO
Penyajian LK:			
A. LRA			
1. Pendapatan			
2. Belanja			
a.			KKR-BEL
B. Neraca			
 Kas di Bendal 	nara Pengelu	naran	
		········	
2. Aset Tetap			
1)			KKR-AT
C. Catatan atas Lap	oran Keuan	gan	
- CALK pada um	umnya belu	m mengungkapkan pos-pos Aset per satker,	
kecuali Aset Te			
	5	Aset Tetap dalam CALK belum disajikan	
		ain pada Peralatan dan Mesin diuraikan	
secara detil per	jenisnya, se	eperti alat besar, alat ukur, dsb.	

NIP

	1. Kas di Bendahara Pengeluaran	
	2. Aset Tetap	
	1)	KKR-AT
	•	KKR-CaLK
Ko	reksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tida	k Disetujui
1. 2.	CaLK pada umumnya belum mengungkapka Tetap – Peralatan dan Mesin. Pengungkapan jenis-jenis Aset Tetap dalam antara lain pada Peralatan dan Mesin diur besar, alat ukur, dsb.	CaLK belum disajikan secara memadai,
	Tanggal,	Tanggal,
	Pengendali Teknis/Ketua Tim	Kepala Bagian Keuangan
	Nama	Nama

NIP

Laporan Hasil Reviu LKPD

Inspektorat Daerah	[Prov/Kab/Kota]
--------------------	-----------------

Nomor

: (diisi dengan tanggal persetujuan konsep LHR) Tanggal

Lampiran Hal

Yth. Jalan

> Dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah [Prov/Kab/Kota] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tahun Neracal, Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut

> Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. PTD

PTD Tanpa Paragraf Penjelas / PTD dengan Paragraf Penjelas

- Dasar Reviu
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; dan
 - d. Surat Tugas Nomor
- 3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal sampai dengan

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu atas LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP.

Sasaran reviu adalah kepala daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan SPI atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP.

LKPD dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- 6. Simpulan dan Rekomendasi (Uraikan secara ringkas hasil reviu, koreksi-koreksi dan rekomendasi)
- 7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya (Uraikan secara ringkas tindak lanjut yang belum dilakukan atas hasil reviu sebelumnya yang dapat berasal dari reviu rutin dan berkala)

Inspektur	Daerah Prov/Kab/Kota
	NIP

LHR merupakan dasar bagi APIP Daerah untuk membuat PTD yang berupa pernyataan tanpa Paragraf Penjelas atau dengan Paragraf Penjelas, sebagai berikut:

a. PTD tanpa paragraf penjelas dibuat apabila tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan SAP.

Contoh PTD Tanpa Paragraf Penjelas adalah sebagai berikut:

"Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah [Prov/Kab/Kota] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tahun Neraca], Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah [Prov/Kab/Kota].

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka,

permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan."

- b. PTD dengan paragraf penjelas dibuat apabila:
 - 1) Terjadi pembatasan dalam pelaksanaan reviu, atau
 - 2) Ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar akuntansi dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah. Koreksi tidak dapat dilakukan antara lain karena: membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga baru dapat dilakukan pada periode berikutnya, koreksi bukan wewenang entitas yang bersangkutan, maupun karena kelalaian entitas yang bersangkutan.
 - 3) Prosedur (teknik reviu) tidak dapat dilaksanakan. Contoh Pernyataan Reviu dengan Paragraf Penjelas adalah sebagai berikut:

"Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah [Prov/Kab/Kota] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tahun Neraca], Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan

adalah penyajian manajemen Pemerintah [Prov/Kab/Kota].

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

*** (Dengan paragraf penjelas)

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan, entitas pelaporan menerapkan (jelaskan metode yang baru diterapkan) sedangkan sebelumnya menerapkan (jelaskan metode sebelumnya), meskipun (metode yang baru diterapkan) tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Entitas pelaporan tidak dapat memberikan pertimbangan yang memadai bagi perubahan tersebut".

DAFTAR PUSTAKA

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2014). Audit Intern.

Kamus Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 3 / PK / 2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Outut) Kegiatan Dana AlokasiKhusus fisik.